



LAPORAN TAHUNAN 2018

CONTENTS

01	KILAS KINERJA 2018	05
02	LAPORAN MANAJEMEN	19
03	PROFIL PERUSAHAAN	27
04	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	45
05	TATA KELOLA PERSEROAN	67
06	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN	83

01

KILAS
KINERJA
2018





A. TUGAS POKOK LRT JAKARTA	09
B. LRT JAKARTA DALAM KEMAJUAN 2018	10
C. RENCANA POLA OPERASI SARANA LRT JAKARTA	11
D. KESIAPAN O&M HINGGA 31 DESEMBER 2018	12
E. MEMBANGUN KESADARAN DAN PERSEPSI PUBLIK	13
F. IKHTISAR KEUANGAN	14
G. PERISTIWA PENTING 2018	15



A

TUGAS POKOK LRT JAKARTA

Penyelenggaraan Layanan LRT Jakarta Koridor 1 (Fase 1) melayani rute sepanjang $\pm 5,8$ km yang membentang dari Pegangsaan Dua (Kelapa Gading) hingga Velodrome (Rawamangun), dengan 6 (enam) Stasiun Layang, yang terdiri atas Sta.Pegangsaan Dua, Sta.Boulevard Utara, Sta.Boulevard Selatan, Sta.Pulomas, Sta.Equestrian, dan Sta.Velodrome serta didukung Depo LRT Jakarta yang dibangun seluas ± 100.000 m² di area Pegangsaan Dua, berdekatan dengan Sta.Pegangsaan Dua.

Dalam penyelenggaraan Layanan LRT Jakarta, PT LRT Jakarta (“Perusahaan”) akan memegang peranan sebagai :

- Penyelenggaraan Sarana LRT Jakarta, meliputi pengadaan, operasi dan perawatan, serta penguasaan Sarana LRT Jakarta, akan mengoperasikan 8 (delapan) Trainset *Light Rail Vehicles* (“LRV”), dengan kapasitas penumpang ± 270 orang/Trainset serta desain *headway* (jarak antar keberangkatan) tiap 10 (sepuluh) menit.
- Pihak yang ditunjuk oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (“PT Jakpro”) selaku Penyelenggara Prasarana LRT Jakarta, yang akan berperan dalam melakukan operasi dan perawatan Prasarana LRT Jakarta.

Guna mendukung perannya dalam penyelenggaraan Layanan LRT Jakarta tersebut, Perusahaan harus memiliki minimal 3 (tiga) Trainset LRV serta *Automatic Fare Collection*, (“AFC”). Atas kebutuhan tersebut, Perusahaan akan mendapatkannya dari PT Jakpro melalui mekanisme Inbreng Aset.

Sebagai bagian dari layanan yang diberikan, publik dapat mengakses Layanan LRT Jakarta dengan menggunakan kartu yang diterbitkan Perusahaan (tiket *closed loop*) yang terdiri atas kartu *Single Journey (Single Trip)*, *Season Pass*, dan *Store Value (Multi Trip)* serta kartu uang elektronik yang diterbitkan perbankan (tiket *open loop*).

B LRT JAKARTA DALAM KEMAJUAN 2018

Hingga tanggal 31 Desember 2018, pembangunan LRT Jakarta telah mencapai progres 92,50%, yang mencakup progres pengadaan Sarana LRT Jakarta sebesar 98,9%, dan progress pembangunan Prasarana LRT Jakarta mencapai 91,30%.

Kemajuan pembangunan yang menjadi tanggung jawab PT Jakpro ini mencakup proses pembangunan secara holistik yaitu *mainline structure* (progres 99%), *depot structure* (progres 85%), *railway system installation* (progres 67%), *railway system testing & commissioning* (progres 38%) serta *rolling stock* (progres 100%).

Sedangkan kemajuan kesiapan pengoperasian Layanan LRT Jakarta yang menjadi tanggung jawab Perusahaan terkait dengan perizinan dan kesiapan Sumber Daya Manusia (“SDM”), secara ringkas sebagai berikut:

- Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum No.8120104802339, tertanggal 23 Agustus 2018.
- Telah diselesaikan beberapa item syarat diterbitkan Izin Operasi Sarana, antara lain: Sertifikat Uji atas 4 (empat) Trainset LRV, Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana, Sertifikasi Tenaga Perawatan Kereta, Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Kereta, Sistem dan Prosedur Operasi, serta Penetapan Lintas Layanan.
- Total jumlah SDM Perusahaan di tahun 2018 sejumlah 159 orang.

C

RENCANA POLA OPERASI SARANA LRT JAKARTA

Operasi secara komersial atas penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jakarta Koridor 1 (Fase 1) sepanjang $\pm 5,8$ KM dari Sta.Pegangsaan Dua (Kelapa Gading) hingga Sta.Velodrome (Rawamangun). Rencana integrasi dengan BRT TransJakarta (Koridor 4 rute Pulogadung–Dukuh Atas) dilakukan di antara Sta.Velodrome dan Halte Pemuda (Rawamangun), melalui *Skywalk* dan *Gate* Integrasi. Rencana integrasi ini dilakukan sebagai salah satu wujud *smart mobility* antar moda transportasi publik sehingga pada akhirnya mampu untuk mengurai kemacetan.

Pola operasi yang akan dilaksanakan secara garis besar adalah sebagai berikut:

TABEL 1 Rencana Pola Operasi LRT Jakarta

No.	Item	Rencana Operasi	Keterangan
1	Panjang lintas	$\pm 5,8$ KM	-
2	Jumlah stasiun beroperasi	6 stasiun	-
3	Lama berhenti di stasiun	± 2 Menit	-
4	Waktu perjalanan	± 13 Menit	-
5	Jumlah LRV yang beroperasi (train set)	4 train set (coupling)	2 train set <i>standby</i> 2 train set cadangan
6	Pengaturan <i>headway</i>	10 menit	-
7	Jumlah perjalanan dalam 1 hari	204 perjalanan	17,5 jam operasi

Dengan asumsi target penumpang sejumlah 14.225 orang/hari, dimana target tersebut di atas sudah memasukkan faktor integrasi dengan moda transportasi lainnya, yakni BRT TransJakarta Koridor 4 rute Pulogadung – Dukuh Atas. Sedangkan besaran Tarif Layanan yang digunakan berdasarkan Ketetapan dalam Peraturan Gubernur.

D**KESIAPAN O&M HINGGA 31 DESEMBER 2018**

Menjelang peralihan masa transisi dari pekerjaan konstruksi oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) hingga fase operasional oleh PT LRT Jakarta, Perusahaan telah melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Pencapaian atas kesiapan tersebut tercatat signifikan sebagaimana disampaikan di bawah ini :

DESKRIPSI AKTIVITAS	KETERANGAN
PERSIAPAN INSTITUSI	
Regulasi/Peraturan	Izin Usaha Sarana Izin Usaha Peyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum No.8120104802339, tertanggal 23 Agustus 2018.
Pedoman/Petunjuk/ Standar Teknik Operasi dan Pemeliharaan	Persetujuan SOP Pengoperasian KA LRT Jakarta oleh Dirjend Pengeretaapian, Kementerian Perhubungan
Penentuan Sistem Operasi dan Perawatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan Grafik Perjalanan Kereta ke Gubernur Provinsi DKI Jakarta • Rekomendasi <i>safety assessment</i> dari Kementerian Perhubungan
Struktur Organisasi dan Persyaratan Personel	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Organisasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 002/SDM/111/X/2018 • Sertifikasi ASP sejumlah 24 orang • Serifikasi Perawatan Prasarana 10 orang • Sertifikasi Pemeriksa Prasarana 10 orang
Program Pelatihan	Telah dilakukan serangkaian Pendidikan dan pelatihan serta pengujian (sertifikasi), terutama untuk SDM Operasional
Sistem Komputerisasi Operasi dan Perawatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Komputerisasi Operasi (OCC) dalam tahap implementasi menuju pengujian, • Sistem Komputerisasi Perawatan (Maximo) dalam tahap pelatihan dari Hyundai Rottem

Grafik Perjalanan Kereta	Usulan Gapeka telah disampaikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Harga Satuan Operasi dan Perawatan	Masih dalam pembahasan dengan Dinas Pehubungan Provinsi DKI Jakarta, terkait formula subsidi per penumpang
PERSIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA	
Awak Sarana Perkeretaapian	Telah dilakukan Sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian atas 24 orang SDM LRT Jakarta
Operation Control Center	Telah dilakukan Sertifikasi Pengatur Kereta dan Pengendali Perjalanan Kereta atas SDM LRT Jakarta
SDM Perawatan	Telah dilakukan Sertifikasi Perawatan Prasarana Perkeretaapian atas 10 orang SDM LRT Jakarta, dan Sertifikasi Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian atas 10 orang SDM LRT Jakarta
SDM Pelayanan	Sejumlah 110 orang SDM Pelayanan mengikuti studi banding di berbagai operator moda transportasi umum

E

MEMBANGUN KESADARAN DAN PERSEPSI PUBLIK

Proyek LRT Jakarta merupakan salah satu proyek strategis yang memberikan solusi terhadap penanganan kepadatan lalu lintas serta menghadirkan moda transportasi publik yang modern. Perusahaan memerlukan dukungan publik melalui peningkatan kesadaran atas manfaat yang dihasilkan dari kehadiran proyek LRT Jakarta ini.

Sepanjang tahun 2018, Perusahaan senantiasa dan secara intensif membangun kesadaran publik melalui kegiatan-kegiatan kehumasan yang mampu memberikan nilai berupa dukungan dan kepercayaan publik terhadap proyek LRT Jakarta, dengan melakukan pemberitaan melalui *Media Gathering*/Media Forum sehingga pemberitaan yang positif dapat tersalurkan di Majalah, Koran, *Online*, Radio, dan Televisi.

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2018	Prognosa 2018	RKAP 2018	Perubahan (%)	
	(Audited)	(b)	(c)	a/b	a/c
	(a)				
Pendapatan	--	--	15.431,6	n.a	0,0%
Beban Pokok Pendapatan	--	(2.658,0)	(39.700,0)	0,0%	0,0%
Laba Kotor	--	(2.658,0)	(24.268,4)	0%	0%
Beban Pemasaran	(22,6)	(1.100,0)	--	2%	n.a
Beban Umum dan Administrasi	(13.924,8)	(24.442,7)	(34.200,0)	57,0%	40,7%
Pendapatan/Beban Lainnya	3.220,7	1.941,5	--	165,9%	n.a
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(10.726,7)	(26.259,1)	(58.468,4)	40,8%	18%
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(7.244,3)	(26.259,1)	(58.468,4)	27,6%	12,4%

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2018	Prognosa 2018	RKAP 2018	Perubahan (%)	
	(Audited)	(b)	(c)	a/b	a/c
	(a)				
Aset Lancar	140.747,7	121.867,6	99.029,9	115,5%	142,1%
Aset Tidak Lancar	5.929,3	447.658,4	531.206,7	1,3%	1,1%
Jumlah Asset	146.676,9	569.526,0	630.236,6	25,8%	23,3%
Kewajiban Jangka Pendek	3.609,8	--	--	n.a	n.a
Kewajiban Jangka Panjang	311,5	--	--	n.a	n.a
Jumlah Kewajiban	3.921,3	--	--	n.a	n.a
Modal Saham	150.000,0	595.785,2	688.688,4	25,2%	21,8%
Laba/Rugi Ditahan	(7.244,3)	(26.259,1)	(58.451,9)	27,6%	12,4%
Jumlah Ekuitas	142.755,7	569.526,0	630.236,6	25,1%	22,7%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	146.676,9	569.526,0	630.236,6	25,8%	23,3%

G**PERISTIWA PENTING TERKAIT KESIAPAN OPERASIONAL DI 2018****April 2018****16 April 2018**

Tonggak pendirian PT LRT Jakarta, dengan desain awal sebagai badan penyelenggara sarana perkeretaapian LRT Jakarta. Melalui Akta Pendirian No.10 tanggal 14 April 2018 yang dibuat Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, di Jakarta.

Mei 2018**7 Mei 2018**

Dimulainya serangkaian Program Pendidikan dan Latihan SDM Operasional PT LRT Jakarta, bidang Awak Sarana Perkeretaapian dan Prasarana di Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun.

17 Mei 2018

Pertama kalinya dilaksanakan Uji Statis Sarana LRT Jakarta (*Light Rail Vehicle/LRV*) oleh Balai Pengujian Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Juli 2018**3 Juli 2018**

Dimulainya serangkaian pengujian Prasarana LRT Jakarta oleh Balai Pengujian Dirjen KA KEMENHUB.

12 Juli 2019

Pelaksanaan Uji Pertama Dinamis pada LRV trainset 1 dan Uji Pertama Statis pada LRV trainset 2,3 dan 4 oleh Balai Pengujian Dirjen KA Kementerian Perhubungan.

26-27 Juli 2019

Pembahasan Finalisasi Rencana Tarif dan Usulan Kebutuhan PSO LRT Jakarta yang melibatkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Kementerian Perhubungan RI, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan SKPD terkait.

Agustus 2018

15 Agustus – 14 September 2018

Pelaksanaan Uji Coba Operasi Asian Games (Terbatas dengan Penumpang Umum) antara Stasiun Velodrome dan Stasiun Boulevard Utara.

21 Agustus 2018

Diterbitkannya Hasil Pengujian:

- Fasilitas Operasi (*Third Rail Section 1-5A, Grounding, Radio Tetra dan Gardu*) LRT Jakarta.
- Jalur dan Bangunan (Section1-5A, emplasemen dan wesel) LRT Jakarta Dengan terbitnya Sertifikat Rekomendasi Teknis No. 35/SRT/K3/DJKA/VIII/2018.

21 Agustus 2018

Diterbitkannya Surat Rekomendasi Teknis Prasarana Perkeretaapian LRT Jakarta Stasiun Velodrome-Kelapa Gading oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian No. 27/RKT/K3/DJKA/VIII/2018.

23 Agustus 2018

Diperolehnya Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT LRT Jakarta dari *Sistem Online Single Submission (OSS)* BKPM Pusat.

28 Agustus 2018

Diterbitkannya Sertifikat Uji Pertama (Laik Operasi) untuk 4 (empat) Trainset oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian No. C.363/K4/DJKA/VIII/2018.

28 Agustus 2018

Diterbitkannya Surat Rekomendasi Keselamatan untuk Uji Operasi dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian No.B.399/K5/DJKA/VIII/2018.

Oktober 2018

5 Oktober 2018

Diskusi penetapan tarif penyelenggaraan LRT Jakarta dengan pihak Dinas Perhubungan, Biro Perekonomian, Bappeda dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

30 Oktober 2018

Diskusi lanjutan pembahasan formula subsidi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian LRT Jakarta dengan Biro Perekonomian, Dinas Perhubungan, dan Bappeda.

November 2018

26 November 2018

Diterbitkannya Izin Lintas Layanan LRT Jakarta Fase 1 koridor 1 Kelapa Gading – Velodrome berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1746 Tahun 2018 Tanggal 26 November 2018.

Desember 2018

12 Desember 2018

Pelaksanaan Uji Pertama Dinamis pada LRV trainset 7 dan 8 dan Uji Pertama Statis pada LRV trainset 5 dan 6 oleh Balai Pengujian Dirjen Perkeretaapian KEMENHUB

14 Desember 2018

- Diterbitkannya berita acara pelaksanaan pengujian pertama untuk LRV oleh Tim Penguji Sarana Ditjen Perkeretaapian.
- Pengajuan Tarif penyelenggaraan LRT Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI melalui Biro Perekonomian.

27 Desember 2018

Pengajuan Penerbitan Izin Operasi Sarana kepada Pemerintah Provinsi DKI No. 010/DRU/110/XII/2018.



02

LAPORAN MANAJEMEN





*moving
people,
connecting
communities*

02 LAPORAN MANAJEMEN

Table of Content

A. LAPORAN DEWAN KOMISARIS	23
B. LAPORAN DIREKSI	26



A

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Selama tahun 2018, perkembangan transportasi publik di Wilayah Jakarta terus tumbuh dengan peningkatan jumlah pengguna transportasi publik yang terus meningkat setiap tahunnya, Berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, setiap hari terdapat sekitar 7 - 8 juta pengguna transportasi umum di DKI Jakarta.

Masih tingginya pengguna transportasi publik di DKI Jakarta dan sekitarnya tersebut merupakan salah satu concern utama Dewan Komisaris dalam memperhatikan terjadinya penambahan jumlah pengguna serta implementasi integrasi antar moda transportasi yang direncanakan untuk diterapkan dalam beberapa tahun kedepan setelah MRT dan LRT resmi beroperasi.

Penilaian atas Implementasi Strategi Perseroan Tahun 2018.

Dewan Komisaris juga menyambut baik jumlah pengguna LRT Jakarta pada saat uji coba publik dalam rangka mendukung Asian Games 2018 yang cukup antusias setiap harinya.

Disisi lain, Dewan Komisaris juga terus menghimbau Manajemen untuk terus melakukan penyempurnaan sistem dan peraturan, khususnya terkait persiapan pengoperasian LRT Jakarta. Langkah tersebut merupakan perwujudan dari komitmen untuk mewujudkan tercapainya penggunaan transportasi umum dan integrasi antar moda transportasi di DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Dewan Komisaris juga menghimbau Direksi dan seluruh manajemen untuk terus menempatkan komitmen keamanan, keandalan dan kenyamanan penumpang sebagai landasan utama dalam mengembangkan bisnis serta terus mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di berbagai bidang guna mendukung visi perusahaan yaitu menjadi solusi mobilitas publik terbaik di Indonesia.

Penilaian atas Prospek Usaha

Dewan Komisaris memandang bahwa tujuan pendirian Perusahaan adalah untuk menyediakan layanan transportasi publik berbasis rel di Jakarta.

Dengan terobosan dan menggunakan teknologi yang aman dan handal dalam operasionalisasi LRT Jakarta, dapat membawa peluang tersendiri bagi Perusahaan. Keunggulan teknologi tersebut harus terus ditingkatkan dengan peningkatan sarana, persiapan awak untuk operasi sarana, program edukasinya agar implementasi integrasi antar moda transportasi publik dapat dieksekusi secara lancar.

Peran Dewan Komisaris Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Dewan Komisaris untuk mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi sepanjang Tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas perusahaan, diantaranya :

- Pengawasan yang terkait dengan penetapan standar keselamatan,
- Pengawasan yang terkait dengan standar kepatuhan dan sertifikasi,
- Pengawasan yang terkait dengan penyiapan infrastruktur organisasi (Manajemen Sumber daya, manajemen resiko, dan Manajemen Keselamatan Kerja), serta
- Hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, Dewan Komisaris menilai Perusahaan telah dijalankan dengan baik dengan tingkat kepatuhan yang terus meningkat.

Penutup

Sebagai penutup, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kinerja Perusahaan selama tahun 2018. Kepada Pemegang saham, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih atas kepercayaan kepada Perusahaan selama tahun 2018, juga kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan yang diberikan kepada Perusahaan.

Kami juga berterima kasih atas kerja keras Direksi, pegawai dan seluruh pihak yang bekerja tanpa kenal lelah untuk memastikan tersedia layanan LRT Jakarta yang andal, aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat.

Akhir kata, marilah kita terus dukung solusi angkutan masal dengan menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama masyarakat melalui penyediaan transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau.

Jakarta, 18 Juli 2019



Komisaris

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Secara spesifik terkait perkembangan sektor transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta, ditengah gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menargetkan pengguna transportasi umum di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya mencapai 60% pada tahun 2029, dengan skenario MRT, LRT dan KRL telah berfungsi dan menjadi bagian penting dalam mobilisasi masyarakat.

Perusahaan memandang kondisi tersebut sebagai prospek pengembangan bisnis yang sangat positif dan terus merancang serta mengimplementasikan program kerja guna memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dalam sektor transportasi publik berbasis rel.

Apresiasi

Sebagai motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna dan konsumen utama, Direksi mewakili seluruh manajemen menyampaikan terima kasih mendalam kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan atas komitmen dan dukungan yang diberikan. Kami juga berterima kasih kepada Dewan Komisaris atas setiap rekomendasi dan nasihat yang diberikan serta kepada seluruh pegawai atas kerja keras dan dedikasi dalam menjalankan tugas-tugas dan kerjasama yang baik dalam mencapai target kinerja Perusahaan tahun 2018.

Jakarta, 18 Juli 2019



Direktur Utama

03

PROFIL PERUSAHAAN





A. IDENTITAS PERUSAHAAN	31
B. RIWAYAT SINGKAT LRT JAKARTA	32
C. VISI DAN MISI	33
D. NILAI-NILAI PERUSAHAAN	34
E. MAKNA LOGO	35
F. BIDANG USAHA	36
G. STRUKTUR ORGANISASI	37
H. PROFIL DEWAN KOMISARIS	38
I. PROFIL DIREKSI	39
J. SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI	40
K. KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM	44
L. INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN	44

“

*LRT Jakarta
menyediakan layanan
transportasi publik
warga Jakarta yang
aman dan nyaman*

”

A**IDENTITAS PERUSAHAAN**

Nama Perusahaan

PT LRT JAKARTA

Tanggal Pendirian

16 April 2018

Dasar Hukum Pendirian

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT LRT Jakarta No. 10 tanggal 16 April 2018 dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, Sh, M.Kn, Notaris di Jakarta

Status Perusahaan

Anak Perusahaan BUMD

Bidang Usaha

Penyelenggara Sarana dan Prasarana Kereta Api

Kegiatan Usaha

Pengoperasian dan Perawatan Sarana serta Prasarana

Kepemilikan

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 99,0%
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo 1,0%

Modal Dasar

Rp600.000.000.000,-

Modal Ditempatkan
& Disetor Penuh

Rp150.000.000.000,-

Kantor Pusat

Gedung MCC,
Depo LRT Jakarta

Depo LRT

Depo LRT Jakarta
JI Pegangsaan Dua,
Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250

B**RIWAYAT SINGKAT LRT JAKARTA**

Dengan semakin meningkatnya penggunaan alat transportasi di DKI Jakarta, dan disisi lain pertumbuhan sarana berupa jalan yang semakin sulit berdampak pada semakin parahnya tingkat kemacetan di dalam kota. Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah DKI Jakarta telah berupaya dengan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan mengembangkan sistem transportasi berbasis rel.

PT Jakarta Propertindo sebagai Perusahaan Daerah Provinsi DKI Jakarta terpenggil untuk turut serta membantu pemerintah untuk segera merealisasikan program tersebut dengan membangun proyek LRT Jakarta. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 154 Tahun 2017 Pasal 39 ayat (4) yang merupakan tonggak awal didirikannya anak perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu agar Prasarana dan Sarana LRT dapat dioperasikan, dirawat dan/atau diusahakan secara efisien, efektif dan sesuai tata kelola yang baik.

PT LRT Jakarta (“Perseroan”) berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, yang secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

PT LRT Jakarta (PT LRT) didirikan di Jakarta pada tanggal 16 April 2018 berdasarkan Akta No. 10 tanggal 16 April 2018 dari Nanda Fauz Iwan, Sh, M.Kn, Notaris di Jakarta.

Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0020380.AH.01.01, tanggal 17 April 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT LRT Jakarta. Saat ini PT LRT Jakarta berdomisili di Gedung Thamrin City, Lantai 1, Lobby Timur, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat, 10340, Indonesia.

VISI



*Menjadi solusi
mobilitas publik
terbaik di Indonesia* ”

MISI

- Menyediakan layanan transportasi publik warga Jakarta yang aman dan nyaman,
- Mengembangkan jaringan transportasi publik yang modern dan terintegrasi, serta
- Membangun reputasi perusahaan dengan pengembangan sumber daya manusia yang LRTJ.

D

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Nilai-nilai Organisasi yang menjadi acuan dalam berperilaku di LRT Jakarta tentang *Code of Conduct* yang akan diputuskan dalam Surat Keputusan Direksi. Nilai-nilai tersebut adalah “**LRTJ**” yaitu:

LINCAH (*Agile*)

Kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan apapun kebutuhan pelanggan, bebas dari kungkungan jabatan dan paparan tugas yang diemban.

RAMAH (*Hospitable*)

Kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik, sesuai tanggungjawab masing-masing dan bahkan lebih dari itu, dengan tulus dan dilandasi dengan niat yang murni untuk melayani pelanggan.

TERPERCAYA (*Reliable*)

Kehandalan dalam melaksanakan tugas, yang ditunjukkan dengan kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi serta komitmen untuk melaksanakan setiap tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sasaran dan tata cara yang telah ditetapkan.

JUJUR (*Honest*)

Melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat dengan tulus dari hati, berani bertanggungjawab atas hasil kerja atau perbuatan sendiri dan taat pada semua peraturan yang berlaku.

E**MAKNA LOGO**

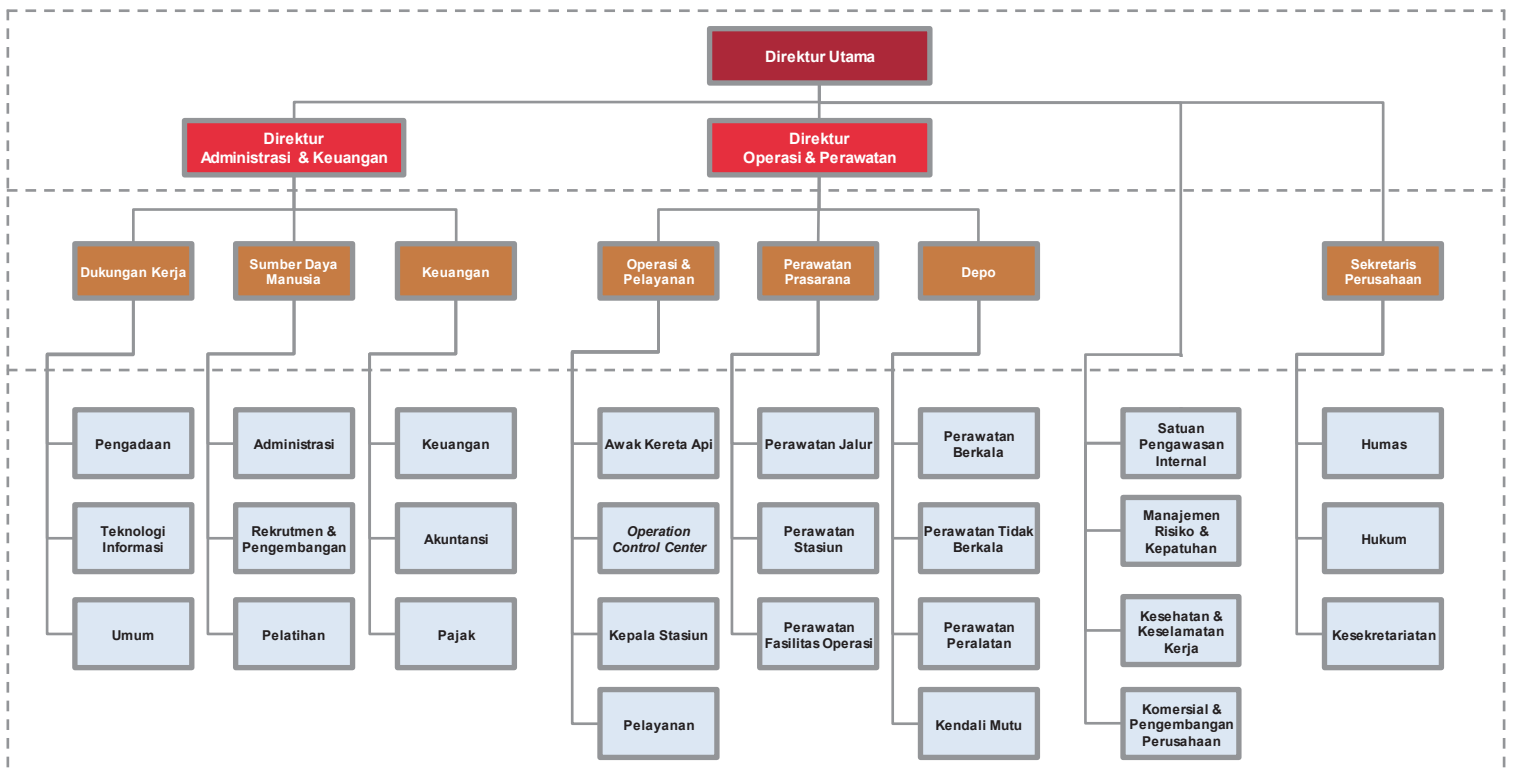
Logo LRT Jakarta mengambil gambar lingkaran utuh membentuk 3 garis yang secara keseluruhan merupakan representasi bentuk kereta api LRT Jakarta yang bergerak maju dan progresif di bidang perkeretaapian. Warna merah mencerminkan keuletan dan ketegasan serta keberanian dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dengan warna emas merepresentasikan prestasi, kesuksesan, kemewahan, kemenangan dan kemakmuran. Warna merah dan emas adalah warna inti PT LRT Jakarta. Warna-warna ini digunakan dalam berbagai aplikasi dan selalu mencerminkan identitas perusahaan PT LRT Jakarta itu sendiri.

Dalam logo LRT Jakarta, terdapat 2 (dua) kata kunci yang menyatu sebagai tagline, yakni “*moving people*” dan “*connecting communities*”. Tagline ini didesain untuk menarik perhatian dengan ringkas dan memberikan pemahaman mengenai citra perusahaan yang ingin dibangun kepada pelanggan. Tagline ini mencakup visi dan misi LRT Jakarta, yakni memobilisasi warga DKI dan menghubungkan seluruh komunitas warga DKI.

Bidang Usaha PT LRT Jakarta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta No.25 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat Notaris Wiwik Condro, SH di Jakarta adalah sebagai Penyelenggara Sarana dan Prasarana Kereta Api. Berdasarkan pasal 3 (tiga) Akta tersebut, ruang lingkup usaha Perusahaan mencakup:

TABEL 2 Ruang Lingkup Usaha

PT. LRT JAKARTA	
<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan Jalan Rel Perkotaan • Konstruksi Jalan Rel & Jembatan Rel • Konstruksi Bangunan Elektrikal • Konstruksi Sinyal & Telekomunikasi Kereta Api • Konstruksi Jaringan Elektrikal & Telekomunikasi Lainnya • Reparasi Lokomotif & Gerbong Kereta • Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum • Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa • Aktivitas Konsultasi Transportasi • Jasa Inspeksi Periodik • Periklanan • Aktivitas Penyewaan & Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat • Pendidikan Lainnya Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Instalasi Listrik • Instalasi Sinyal & Telekomunikasi Kereta Api • Aktivitas Stasiun Kereta Api • Pengadaan Kargo (Bongkar Muat Barang) • Jasa Pengurusan Transportasi • Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api & Ekspedisi • Aktivitas Telekomunikasi dengan dan Tanpa Kabel • Periklanan • Aktivitas Penyewaan & Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat • Pendidikan Lainnya Swasta



H

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Satya Heragandhi | Komisaris PT LRT Jakarta



Pria kelahiran Semarang, 51 tahun lalu ini berhasil menuntaskan pendidikan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Indonesia tahun 1988-1993, memasuki awal kariernya sebagai Management Trainee di PT Metro Data Electronic Tbk antara tahun 1993-1994.

Seiring berjalannya waktu, menapaki karier kedua di perusahaan *Bakrie Communications* dengan jabatan *International Sales Director* untuk *ARTS International Ltd* and *Human Capital Leader for Bakrie Communication* yang berjalan antara tahun 1994 hingga 2000.

Usai menamatkan studinya di Institute Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) dengan menyandang Master of Business Administration (MBA) pada tahun 1998-2000, selanjutnya berkarier di SIEMENS sebagai Head of Marketing antara tahun 2000 -2001.

Lalu pada tahun 2001-2004, berpindah karier menjadi *Director of Business Development* di PT General Electrics (GE) International Inc. Kemudian antara tahun 2004-2010, menjabat sebagai *Sales Director of South East Asia GE* bidang transportasi kereta. Hampir dalam waktu bersamaan, menjabat pula sebagai *President Director General Electric Operation Indonesia* tahun 2005-2010. Sedangkan tugasnya sebagai President Director PT Sanggar Sarana Baja mulai digeluti antara tahun 2012 hingga 2016. Amanah sebagai Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda), beliau laksanakan dalam periode 2016 - 2018.

Berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang tertuang dalam Akta No.10 tanggal 14 April 2018 yang di buat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn di Jakarta, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0020380.AH.01.01, tanggal 17 April 2018, bahwa susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Allan Tandiono | Direktur Utama PT LRT Jakarta



Pria kelahiran Jakarta, menjabat sebagai Direktur Utama PT LRT Jakarta sejak April 2018. Beliau sebelumnya menjabat sebagai *Project Director* di PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Meraih gelar Master of Science dari Nanyang Technological University dan Bachelor of Engineering dari National University of Singapore.

Solihin Djaelani Mian | Direktur Keuangan PT LRT Jakarta



Berpengalaman lebih dari 28 tahun, Solihin merupakan akuntan professional lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1996 dan meraih gelar Magister of Management dari Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SP-IPB). Beliau pernah menduduki posisi Direktur pada perusahaan Multifinance, Direktur dan Komisaris pada beberapa perusahaan property dan pengelolaan Gedung, serta Partner disebuah Kantor Akuntan Publik di Jakarta.

Sebelum diangkat menjadi Direktur Administrasi dan Keuangan PT LRT Jakarta, beliau menduduki posisi GM Keuangan dan Akuntansi di PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selama 2 tahun.

Kesadaran akan kebutuhan intergrasi antar moda transportasi publik, mendorong Perusahaan untuk terus meningkatkan kompetensi dan keandalan Sumber Daya Manusia sebagai faktor kunci dalam pelayanan transportasi publik yang diberikan kepada masyarakat.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia 2018

Perseroan menerapkan strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2018 sesuai dengan kebutuhan di dalam Perusahaan. Selain program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang terus dilakukan secara konsisten, Perusahaan juga telah merealisasikan program kerja bidang SDM pada tahun 2018, antara lain:

- Penerapan absensi program Talenta,
- Pembaharuan data pegawai melalui HRIS,
- Penyempurnaan data kepegawaian,
- Remunerasi berdasarkan Kinerja/Disiplin,
- Pengelolaan SDM berbasis kompetensi (model kompetensi, kamus dan matrik kompetensi),
- Penyelesaian/revisi SK Direksi terkait Sumber Daya Manusia, dan
- Program kerja lain terkait peningkatan kompetensi serta kesejahteraan pegawai.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM

Perusahaan telah merancang rencana program pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM, baik soft-skill maupun hard-skill yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja. Program Pelatihan dan pengembangan SDM yang diberikan meliputi kompetensi spesifik dalam bidang transportasi berbasis rel maupun kompetensi lain terkait keamanan, pelayanan, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Rekrutmen SDM

Perusahaan menerapkan beberapa mekanisme rekrutmen pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di masing-masing level organisasi. Mekanisme rekrutmen SDM di Perusahaan, antara lain melalui:

1. Jalur Internal Sumber daya berasal dari internal Perusahaan (PKWT).
2. Jalur Eksternal/Reguler Sumber daya berasal dari eksternal Perusahaan, info lowongan kerja melalui website.
3. Jalur Profesional, untuk posisi Managerial Level.

Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan perekrutan pegawai sebanyak 159 orang pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan bisnis dan wilayah layanan Perusahaan.

Komposisi SDM 2018

Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2018
SMA	19
D.III	89
D.IV	6
S1	37
S2	8
Total Karyawan	159

Komposisi SDM berdasarkan Usia

Usia	2018
18 - 30 Tahun	125
31 - 40 Tahun	17
41 - 50 Tahun	10
51 - 60 Tahun	7
Jumlah	159

Komposisi SDM berdasarkan Jabatan

Jabatan	Karyawan
Direksi & Komisaris	3
GM	5
Manajer	11
Ass Manajer	9
Supervisor	6
Officer	35
Staff	90
Total Karyawan	159

Program Pelatihan Pegawai 2018

Untuk mempersiapkan kualitas yang maksimal di bidang Sumber Daya Manusia, PT LRT Jakarta telah melakukan berbagai pelatihan dan sertifikasi, diantaranya adalah:

No.	Judul Pelatihan	Peserta	Pelaksanaan
1	Diklat Orientasi Dasar Perkeretaapian	Staf Perawatan & Pemeriksa Prasarana	19 - 28 Februari 2018
2	Diklat Perawatan & Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian (Jalur & Bangunan)	Staf Perawatan & Pemeriksa Sarana	7 - 25 Mei 2018
3	Diklat Awak Sarana Perkeretaapian	Awak KA	7 Mei - 9 Juni 2018
4	Uji Kompetensi Perawat & Pemeriksa Jalur & Bangunan	Staf Perawat Prasarana	2 Juli 2018
5	Diklat Orientasi Dasar Perkeretaapian	Staf Perawatan & Pemeriksa Prasarana Staf Perawatan & Pemeriksa Sarana	2 - 11 Juli 2018
6	Uji Kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian	Awak KA	16 Juli 2018

No.	Judul Pelatihan	Peserta	Pelaksanaan
7	Workshop Awak Sarana Perkeretaapian	Pegawai Operasi Awak KA	22 - 24 Juli 2018
8	Diklat Operation Control Centre (OCC)	Staf OCC	22 Juli - 2 Agustus 2018
9	Diklat Menyusun KPI dan Pengukuran Kinerja	General Manajer Corporate Support	30 - 31 Agustus 2018
10	Essential Skill: Pelayanan Prima	Pegawai unit Pelayanan	16 & 18 Oktober 2018
11	Essential Skill: Komunikasi Efektif	Pegawai unit Pelayanan	23 & 25 Oktober 2018
12	Essential Skill: Mendengar secara Aktif	Pegawai unit Pelayanan	30 Oktober & 1 November 2018
13	Essential Skill: Manajemen Waktu	Pegawai unit Pelayanan	6 & 8 November 2018
14	Peningkatan Kompetensi manajemen Resiko Keselamatan Perkeretaapian	Manajer HSE	26 - 30 November 2018
15	Pembinaan Teknis Analisis Kecelakaan Kereta Api	Staf HSE	26 - 30 November 2018
16	Management Retreat: Penyusunan Visi & Misi PT LRT Jakarta	Direksi General Manager Manager	7 - 8 Desember 2018
17	Pelatihan Auditor Internal berbasis ISO 19001:2011	Manajer HSE Manajer Keuangan Manajer Kesekretariatan	17 - 21 Desember 2018

K**KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM**

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah), terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Dari Modal Dasar tersebut, Modal Ditempatkan dan Disetor penuh oleh Para Pemegang Saham adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu lembar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah).

TABEL 3 Komposisi Kepemilikan Saham PT LRT Jakarta

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Kepemilikan	Nilai
	Lembar	%	Rp
PT JakPro	148.500	99,0	148.500.000.000
PT JIP	1.500	1,0	1.500.000.000
Total Modal	150.000	100,0	150.000.000.000

L**INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN**

Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk senantiasa menjalankan kinerja secara transparan dan akuntabel, Perusahaan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui <http://lrtjakarta.co.id>.

04

ANALISA DAN
PEMBAHASAN
MANAJEMEN





04

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Table of Content

A. TINJAUAN KESIAPAN OPERASI	49
B. TINJAUAN KEUANGAN	59
C. PROYEKSI TAHUN 2019	62
D. PROSPEK PERUSAHAAN	63
E. ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR	63
F. REALISASI PENGGUNAAN DANA SETORAN MODAL	64
G. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL MELALUI INBRENG	65
H. KELANGSUNGAN USAHA	66
I. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA NON FAREBOX	66

“

Membangun reputasi perusahaan dengan pengembangan sumber daya manusia yang LRTJ.

“



A

TINJAUAN KESIAPAN OPERASI

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Perusahaan senantiasa berusaha mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah sebagai peyelenggara sarana perkeretaapian LRT Jakarta. Selama tahun 2018, kesiapan sumber daya manusia PT LRT Jakarta menjadi salah satu fokus utama yang terkait langsung dengan operasional. Serangkaian Pendidikan dan Latihan (“Diklat”) bersertifikasi telah diikuti oleh SDM PT LRT Jakarta, diantaranya :

a. SDM Awak Sarana Perkeretaapian (“ASP”)

Sepanjang tahun 2018, total sejumlah 24 orang SDM ASP telah lulus sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian, setelah melalui program:

- Diklat Awak Sarana Perkeretaapian di Akademi Perkeretaapian Indonesia, Madiun dari tanggal 7 Mei – 9 Juni 2018,
- Uji Kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian di Stasiun Boulevard Utara, pada tanggal 16 Juli 2018 yang dilakukan oleh Balai Pengujian Kementerian Perhubungan, dan dilengkapi dengan
- *Workshop* Awak Sarana Perkeretaapian, di Depo LRT Pegangsaan Dua, tanggal 22 – 24 Juli 2018.

Setelah melalui serangkaian program di atas, selama tahun 2018 SDM ASP telah dilibatkan secara langsung pada beberapa kegiatan strategis yang bersinggungan dengan tugas dan fungsi ASP, antara lain pengujian dinamis internal Sarana LRV dengan Hyundai Rottem yang dilanjutkan dengan pengujian dinamis Sarana LRV dengan Balai Pengujian Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (12 Juli - 2 Agustus 2018), pelaksanaan Simulasi dilakukan Darurat untuk mendukung rekomendasi teknis Kementerian Perhubungan dalam kegiatan Uji Coba Operasi Asian Games dan puncaknya Uji Coba Operasi Asian Games pada periode 15 Agustus - 14 September 2018.

Pasca pelaksanaan Uji Coba Operasi Asian Games, ASP juga dilibatkan dalam pengujian dan *safety assessment* yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan serta berpartisipasi dalam pembekalan materi komponen dan sistem kerja Sarana LRV oleh Tim Hyundai Rottem.

b. SDM Operation Control Center (“OCC”)

SDM OCC terlibat secara intens dalam Uji Coba Operasi Asian Games. Pembekalan materi pendidikan telah dilakukan kepada SDM OCC, melalui:

- Diklat dan Sertifikasi Pengatur Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api di Akademi Perkeretaapian Indonesia, Madiun dari tanggal 22 Juli - 2 Agustus 2018, dan
- Diklat dan Sertifikasi Pengatur Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api di Kantor LRT Jakarta, Depo Kelapa Gading, dari tanggal 3 - 9 Agustus 2018.

Program kerja terkait tugas pokok fungsi OCC yang dilakukan sepanjang tahun 2018 antara lain penyusunan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) dan penyusunan semboyan kereta api.

Guna meningkatkan kompetensi, SDM OCC juga telah diberikan bimbingan teknis terkait manajemen resiko perkeretaapian serta pelatihan terkait persinyalan, SCADA dan sistem OCC.

c. SDM Pelayanan

Kesiapan SDM Pelayanan secara tidak langsung telah diuji dalam keterlibatannya pada uji coba operasi Asian Games. Selama 1 bulan pelaksanaan uji coba tersebut, SDM Pelayanan sebagai *parties in charge* terdepan yang langsung bersinggungan dengan 11.070 pengunjung LRT Jakarta.

Setelah uji coba operasi tersebut, guna menambah pengalaman dan memperkaya literasi aspek pelayanan, SDM Pelayanan melakukan kunjungan studi banding ke berbagai perusahaan diantaranya PT Indonesia Ferry Property, PT Angkasa Pura 2, PT Garuda Indonesia, PT LRT Jabodebek, PT KCI dan LRT Sumatera Selatan.

d. SDM Perawatan

Diklat Perawatan dan Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian (Jalur dan Bangunan) di Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun selama periode 7 - 25 Mei 2018 yang dilanjutkan dengan Uji Kompetensi, telah menghasilkan 10 SDM Prasarana yang lulus Sertifikasi Perawatan Prasarana dan 10 SDM Prasarana yang lulus Sertifikasi Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian.

Serangkaian kegiatan besar yang melibatkan secara langsung SDM Perawatan sepanjang tahun 2018 antara lain:

- Pelaksanaan Simulasi Darurat, guna mendukung Rekomendasi Teknis Kementerian Perhubungan untuk kegiatan Uji Coba Operasi Asian Games,
- Pelaksanaan Uji Coba Operasi Asian Games,
- Pengujian dan kegiatan Safety Assessment yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, serta
- Pelaksanaan Sertifikasi Sarana LRV.

e. Kunjungan Kerja & Studi Banding

Dalam mempersiapkan SDM LRT Jakarta, Manajemen Perusahaan menginisiasi dilakukannya Studi banding untuk mendapatkan *industry best practices*, khususnya ke beberapa operator moda transportasi publik serta lembaga/perusahaan yang memiliki bentuk layanan yang bisa dijadikan perbandingan.

Studi banding ini dilakukan hampir seluruh Departemen sesuai kebutuhan materi pengetahuan, dengan pelaksanaan sepanjang tahun 2018 antara lain:

- PT Kereta Api Indonesia (LRT Jabodebek), 14 November 2018
- PT Indonesia Ferry Property, 21 November 2018
- PT Angkasa Pura II, 22 November 2018

- PT MRT Jakarta, 29 November 2018
- Garuda International Training Center, 4 Desember 2018
- BPPT bersama Korea Rail Network Authority (KRNA), 4 Desember 2018
- PT Kereta Api Indonesia (LRT Sumatera Selatan), 5 - 6 Desember 2018
- PT KCI, 12 Desember 2018

f. Uji coba Pengoperasian Terbatas LRT Jakarta

Uji coba pengoperasian terbatas LRT Jakarta sebagai pelaksana Uji operasi, dapat menjadi pelatihan dan evaluasi kepada SDM LRT Jakarta. Pengoperasian dan kegiatan administrasi dinas khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pengguna LRT Jakarta. Tujuan pelaksanaan tersebut selain untuk turut serta memeriahkan Asian Games 2018, juga untuk menguji integrasi kelaikan prasarana dan sarana LRT Jakarta, serta dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pengoperasian LRT Jakarta

Pelaksanaan Uji Operasi	
Tanggal Pelaksanaan	15 Agustus 2018 s.d 14 September 2018
Waktu Pelaksanaan	Pukul 14:00 s.d Pukul 17:00
Peserta Uji Operasi	Peserta Terbatas melalui Undangan
Stasiun Uji Operasi	Sta.Velododrome dan Sta. Boulevard Utara
Trainset Uji Operasi	8 Kereta
Jumlah Peserta	+/- 11.070 peserta (hingga 14 September 2018)

Usia	Persentase
5 - 11 tahun	2%
12 - 16 tahun	8%
17 - 25 tahun	20%
26 - 35 tahun	30%
36 - 45 tahun	20%
46 - 55 tahun	15%
> 56 tahun	5%
Total Pengunjung	100%

Uji operasi LRT Jakarta berjalan lancar dengan *zero accident* dan *zero mistake* saat beroperasi, masyarakat berharap pengoperasian komersial LRT Jakarta dapat segera dilakukan.

2. Kesiapan Legalitas, Perizinan dan Regulasi lainnya

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT LRT Jakarta, selalu memastikan agar terpenuhinya aspek legalitas dan perizinan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

a. Perizinan dan Legalitas

Perusahaan didesain bertugas sebagai Penyelenggara Sarana atas Layanan Perkeretaapian LRT Jakarta. Selain legalitas korporasi yang telah dimiliki, terkait tugas sebagai Penyelenggara Sarana, perizinan yang telah dimiliki di tahun 2018 adalah Izin Usaha Sarana.

Izin Operasi Sarana masih dalam proses pengurusan, dengan beberapa item persyaratan yang telah disiapkan antara lain: Studi Kelayakan, Rancang Bangun Sarana LRV, Spesifikasi Teknis Sarana LRV, Sertifikat Uji atas 4 (empat) Trainset LRV, Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana, Sertifikasi Tenaga Perawatan Kereta, Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Kereta, Sistem dan Prosedur Operasi, serta Penetapan Lintas Layanan.

Atas persyaratan krusial lainnya yakni kepemilikan minimal 2 rangkaian kereta, sedang dalam proses Inbreg dari PT Jakpro (setelah dilakukan handover dari PT Hyundai Rottem kepada PT Jakpro dan dilakukan penilaian/appraisal).

Hal yang tak kalah penting finalisasi Rancangan Perjanjian Pengoperasian dan Perawatan Sarana dan Prasarana Light Rail Transit (LRT) Koridor I Fase I Velodrome – Kelapa Gading antara PT Jakpro dan Perusahaan, yang masih dilakukan antara Perusahaan dengan PT Jakpro.

b. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Standar Pelayanan Minimum di LRT Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri (PM) No.48 Tahun 2015 dimana penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian mempunyai standar pelayanan minimum dalam pengoperasiannya.

Sampai dengan 31 Desember 2018, masih dilakukan pembahasan SPM antara Perusahaan dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

c. Grafik Perjalanan Kereta (GAPEKA)

Pada tanggal 26 November 2018, Perusahaan telah mendapatkan penetapan Lintas Layanan yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan pembahasan Grafik Perjalanan Kereta masih dilakukan secara intensif antara Perusahaan dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

d. Standar Operasional Prosedur (“SOP”)

Penyusunan SOP dilakukan baik untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam penyelenggaraan perkeretaapian maupun untuk mempersiapkan diri atas rencana sertifikasi dan implementasi ISO. Penyusunan SOP yang telah dilakukan selama tahun 2018, antara lain:

- Rancangan SOP Alur Dinasan ASP
- Rancangan SOP Tunjuk Sebut Semboyan ASP
- Rancangan SOP Pelayanan
- Rancangan SOP Perawatan dan Pemeriksaan Fasilitas Operasi
- Rancangan SOP Pengoperasian Fasilitas Operasi
- Rancangan SOP Perawatan dan Pemeriksaan Jalur dan Bangunan
- Rancangan SOP Pengoperasian Fasilitas Stasiun
- Rancangan SOP Perawatan Sarana
- Rancangan SOP Keselamatan Perkeretaapian dan Kesehatan Keselamatan Kerja (SOP KPK3)

e. Penugasan Pelayanan Publik (PSO) dan Penetapan Tarif Layanan

Sepanjang tahun 2018, masih dilakukan pembahasan yang intensif mengenai mekanisme pelaksanaan penugasan PSO ini, termasuk formula subsidi dan tarif layanan. Perusahaan telah mendapatkan rekomendasi Tarif Layanan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sebesar Rp10.800 (yang merupakan tarif integrasi dengan layanan BRT Transjakarta).

Melalui serangkaian pembahasan tersebut, output yang diharapkan adalah:

- Peraturan Gubernur mengenai penetapan Tarif Layanan, dan
- Peraturan Gubernur mengenai Subsidi Penyelenggaraan Layanan LRT Jakarta.

3. Kesiapan Prasarana dan Sarana LRT Jakarta

Kesiapan operasi penyelenggaraan Layanan Perkeretaapian LRT Jakarta, tidak terlepas dari kesiapan fisik Prasarana dan Sarana LRT Jakarta.

a. Kesiapan Prasarana : Jalur dan Bangunan, serta Fasilitas Operasi

Progress pembangunan Prasarana LRT Jakarta di tahun 2018 telah mencapai 91,30%, mencakup:

- *mainline structure* (progres 99%),
- *depot structure* (progres 85%),
- *railway system installation* (progres 67%), dan
- *railway system testing & commissioning* (progres 38%)

Dengan progress di atas, maka operasional Layanan Perkeretaapian LRT Jakarta pada bulan-bulan awal hanya dilakukan untuk 5 (lima) stasiun LRT Jakarta (diluar Sta.Pegangsaan Dua).

b. Kesiapan Sarana Light Rail Vehicle

Sebagian Sarana LRV telah digunakan dalam Uji Coba Operasi Asian Games 2018. Proses sertifikasi atas Sarana LRV telah dilakukan untuk Trainset 1 - 4 pada bulan Oktober 2018 dan sisanya dilakukan pada bulan Desember 2018. Trainset LRV No.1 - 4 sudah dinyatakan laik operasi oleh Kemhub dan telah dilakukan serah terima dari PT Hyundai Rottem kepada PT Jakpro.

Secara garis besar, kesiapan Sarana LRV per 31 Desember 2018 telah mencapai sebesar 98,9%.

4. Kesiapan Pendukung Operasi

a. Kantor Pusat Operasional LRT Jakarta (Gedung MCC)

Sampai dengan 31 Desember 2018, Gedung MCC belum bisa digunakan karena masih dalam tahap penyelesaian oleh kontraktor. Namun demikian, secara paralel telah dilakukan proses persiapan, antara lain:

- Pengadaan konsultan *design interior*,
- Pengadaan kontraktor interior dan ME,
- Pengadaan meja kerja/*workstation*, kursi, dan pengadaan karpet, serta
- Pengadaan *furniture* kantor

b. Infrastruktur IT Support

Penggunaan layanan dalam uji coba publik di tahun 2018, terus didukung oleh penguatan kinerja Teknologi Informasi sebagai nilai tambah dalam meningkatkan keandalan dan kualitas Layanan LRT Jakarta yang diberikan kepada masyarakat.

Selama tahun 2018, Perusahaan melaksanakan program Teknologi Informasi rutin serta pengembangan Teknologi Informasi yang diberikan kepada masyarakat. Program Teknologi Informasi rutin meliputi perawatan jaringan dan perangkat TI, pengembangan infrastruktur, pengembangan aplikasi, program kerja terkait lisensi *software* dan *firewall* serta mempersiapkan pengelolaan e-Ticketing.

Disisi lain, seiring dengan program TI rutin tersebut, Perusahaan juga melakukan pengembangan teknologi, yakni penggunaan media informasi kepada penumpang perihal waktu keberangkatan dan waktu kedatangan. Selain pengembangan Teknologi Informasi, Perusahaan juga merealisasikan pengadaan Teknologi Informasi, sebagai berikut:

- Pengadaan infrastruktur e-Ticketing untuk kebutuhan pemasangan di setiap stasiun kereta LRT Jakarta Koridor 1 (Fase 1) : Kelapa Gading – Velodrome.
- Pengadaan Kartu Chip *Security Access Module* (SAM) untuk pengembangan pembayaran tiket Layanan LRT Jakarta melalui *National Payment Gateway* (NPG).
- Pengadaan kerjasama dengan Aplikasi online pembayaran melalui *QR Code* sebagai salah satu pembayaran tiket Layanan LRT Jakarta.
- Implementasi *Enterprise Resource Planning* (ERP).

c. Komitmen terhadap K3 (*Safety, Health & Environment / SHE*)

Sebagai konsekuensi Perusahaan yang bergerak di industri pelayanan umum (transportasi massal) dan merupakan industri yang ter-regulasi maka peranan SHE cukup krusial untuk memastikan rencana kebijakan dan implementasi operasional perusahaan memenuhi kriteria keamanan dan mampu memitigasi segala potensi resiko.

Beberapa aktivitas penting yang telah selesai dilakukan selama tahun 2018, secara garis besar:

- Penyusunan SOP Keselamatan Perkeretaapian dan Kesehatan Keselamatan Kerja yakni penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan No.69 Tahun 2018,
- Pelaksanaan *Health Risk Assessment (HRA) Pre-Operation*, untuk mendapatkan standar kesehatan kerja pengoperasian LRT Jakarta, serta
- Pelaksanaan pelatihan internal K3 dan materi-materi dasar K3L (termasuk *hazard risk, emergency response* dan *fire explosion*).

d. Kebijakan Perusahaan

Untuk mendukung kebutuhan operasional sebagai perusahaan yang bergerak dalam usaha transportasi umum, Perusahaan juga telah menetapkan berberapa kebijakan, antara lain:

- SK Direksi No. 001/SPR/111/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Matriks Kewenangan PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 002/SPR/111/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Kebijakan Surat Menyurat Pengarsipan dan Penghapusan Arsip PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 001/SDM/111/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Ketentuan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Karyawan PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 001/SDM/111/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Ketentuan jam kerja lembur bagi Karyawan PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 002/SDM/111/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Kehadiran Karyawan PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 003/SDM/111/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Rawat Inap bagi Komisaris, Direksi dan Karyawan PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 004/SDM/111/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Rawat Jalan bagi Komisaris, Direksi dan Karyawan PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 002/SDM/111/IX/2018 tanggal 6 September 2018 perihal Model Kompetensi dan Penilaian Kompetensi bagi Karyawan PT LRT Jakarta

- SK Direksi No. 003/SDM/111/IX/2018 tanggal 6 September 2018 perihal Penimbangan Karya bagi Karyawan PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 004/SDM/111/IX/2018 tanggal 6 September 2018 perihal Penghargaan Masa Bakti pada PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 005/SDM/111/IX/2018 tanggal 6 September 2018 perihal Sistem Golongan dan Klasifikasi Jabatan
- SK Direksi No. 006/SDM/111/IX/2018 tanggal 6 September 2018 perihal Penyempurnaan Komponen Upah beserta struktur & Skala Gaji
- SK Direksi No. 007/SDM/111/IX/2018 tanggal 6 September 2018 perihal Pengaturan Pemberian Tj. Jabatan, Bantuan Transport dan Komunikasi
- SK Direksi No. 008/SDM/111/IX/2018 tanggal 6 September 2018 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dan Tunjangan Akhir Tahun (TAT) pada PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 001/SDM/111/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 perihal Ketentuan Praktek Kerja Lapangan atau Magang PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 002/SDM/111/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Struktur Organisasi PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 003/SDM/111/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal Penggunaan Seragam Kerja di Lingkungan PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 001/OPL/111/IX/2018 tanggal 22 September 2018 perihal Standar Operasi Prosedur Pemeriksaan, Perawatan, Pengoperasian Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Light Rail Transit (LRT) Jakarta
- SK Direksi No. 001/KEU/111/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 perihal Keputusan Direksi PT LRT Jakarta tentang Tata Cara Pengeluaran Dana pada PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 002/KEU/111/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Keputusan Direksi PT LRT Jakarta tentang Pemberian Uang Rapat, Honor Kerjasama, Honor Narasumber, dan Biaya Lain Terkait Kegiatan Perusahaan yang Melibatkan Instansi Pemerintah & Lembaga Pemerintah dan Lembaga Negara
- SK Direksi No. 003/KEU/111/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Penempatan Dana pada PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 001/KEU/111/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 perihal Keputusan Direksi Tentang Pedoman dan Kebijakan Akutansi
- SK Direksi No. 001/DUK/111/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 001/DUK/111/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal SK Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa di Lingkungan PT LRT Jakarta

B**TINJAUAN KEUANGAN**

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

1. Posisi Keuangan**TABEL Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)	31 Desember 2018	Prognosa 2018	RKAP 2018	Perbandingan (%)	
	(Audited)	(b)	(c)	a/b	a/c
	(a)				
ASET					
Aset Lancar	140.747,7	121.867,6	99.029,9	115,5%	142,1%
Aset Tidak Lancar	5.929,3	447.658,4	531.206,7	1,3%	1,1%
Jumlah Aset	146.676,9	569.526,0	630.236,6	25,8%	23,3%
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				n.a	na
Kewajiban Jangka Pendek	3.609,8	--	--	n.a	na
Kewajiban Jangka Panjang	311,5	--	--	n.a	na
Jumlah Kewajiban	3.921,3	--	--	n.a	na
Modal Saham	150.000,0	595.785,2	688.688,4	25,2%	21,8%
Laba/Rugi Ditahan	(7.244,3)	(26.259,1)	(58.451,9)	27,6%	12,4%
Jumlah Ekuitas	142.755,7	569.526,0	630.236,6	25,1%	22,7%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	146.676,9	569.526,0	630.236,6	25,8%	23,3%

Sepanjang tahun 2018, Perseroan belum beroperasi secara komersial sehingga dari Total Aset Rp146,7 Miliar, sebesar Rp137,3 Miliar (\pm 93,6%) adalah kas dan setara kas dalam bentuk Giro dan Deposito.

TABEL Aset PT LRT Jakarta

(dalam jutaan Rupiah)	31 Desember 2018	Prognosa 2018	RKAP 2018	Perbandingan (%)	
	(Audited)	(b)	(c)	a/b	a/c
	(a)				
Aset Lancar					
Kas dan Setara Kas	137.269,7	121.867,6	99.000,0	112,6%	138,7%
Investasi Jangka Pendek	--	--	--	n.a	na
Piutang Usaha kepada Pihak Ketiga	--	--	--	n.a	na
Piutang Lain-lain	2.884,2	--	--	n.a	na
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	459,0	--	--	n.a	na
Pajak Pertambahan Nilai	134,8	--	--	n.a	na
Jumlah Aset Lancar	140.747,7	121.867,6	99.000,0	115,5%	142,2%
Aset Tidak Lancar					
Aset Tetap	694,4	447.658,4	531.200,0	0,2%	0,1%
Aset Pajak Tangguhan	3.482,3	--	--	n.a	na
Aset Lain-lain	1.752,5	--	--	n.a	na
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.929,3	447.658,4	531.200,0	1,3%	1,1%
Jumlah Aset	146.676,9	569.526,0	630.200,0	25,8%	23,3%

TABEL Kewajiban PT LRT Jakarta

(dalam jutaan Rupiah)	31 Desember 2018	Prognosa 2018	RKAP 2018	Perbandingan (%)		
	(Audited)			(a)	(b)	(c)
Kewajiban Jangka Pendek						
Utang Usaha	406,7	--	--	n.a	na	
Beban Akruwal	2.992,5	--	--	n.a	na	
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	--	--	--	n.a	na	
Pinjaman Bank	--	--	--	n.a	na	
Utang Pajak	210,6	--	--	n.a	na	
Pendapatan Diterima di Muka	--	--	--	n.a	na	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.609,8	--	--	n.a	na	
Kewajiban Jangka Panjang						
Utang Lain-lain kepada Pihak Ketiga	--	--	--	n.a	na	
Utang Pembelian Aset Tetap	--	--	--	n.a	na	
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	311,5	--	--	n.a	na	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	311,5	--	--	n.a	na	
Jumlah Kewajiban	3.921,3	--	--	n.a	na	

Kewajiban Perseroan per 31 Desember 2018 sebesar Rp3,9 Miliar merupakan beban akruwal atas sisa outstanding kewajiban dalam implementasi Sistem ERP Microsoft Dynamics 365, beban tunjangan karyawan dan jasa konsultan.

TABEL Ekuitas PT LRT Jakarta

(dalam jutaan Rupiah)	31 Desember 2018	Prognosa 2018	RKAP 2018	Perbandingan (%)		
	(Audited)			(a)	(b)	(c)
Modal Saham - Nilai Nominal						
Rp1.000.000 per Saham						
Modal Dasar - Rp 600 Miliar						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000,0	150.000,0	150.000,0	25,2%	21,8%	
Modal Disetor Lainnya	--	445.785,2	538.688,4			
Laba/Rugi Ditahan	(7.244,3)	(26.259,1)	(58.451,9)	27,6%	12,4%	
Jumlah Ekuitas	142.755,7	569.526,0	630.236,6	25,1%	22,7%	

Ekuitas Perseroan di tahun 2018 lebih kecil dari yang direncanakan diawal, hal ini disebabkan karena belum terealisasinya inbreng LRV maupun AFC sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dari PT Jakpro. Dalam RKAP 2018, Perseroan menerima inbreng 8 (delapan) trainset LRV dan AFC, sedangkan dalam Prognosa 2018 dilakukan perubahan asumsi yakni inbreng LRV menjadi sejumlah 6 (enam) trainset.

2. Laba Rugi

TABEL Laba Rugi

KETERANGAN	31 Desember 2018	Prognosa 2018	RKAP 2018	Perubahan (%)	
	(Audited) (a)	(b)	(c)	a/b	a/c
Pendapatan	--	--	15.431,6	n.a	0,0%
Beban Pokok Pendapatan	--	(2.658,0)	(39.700,0)	0,0%	0,0%
Laba Kotor	--	(2.658,0)	(24.268,4)	0%	0%
Beban Pemasaran	(22,6)	(1.100,0)	--	2%	n.a
Beban Umum dan Administrasi	(13.924,8)	(24.442,7)	(34.200,0)	57,0%	40,7%
Pendapatan/Beban Lainnya	3.220,7	1.941,5	--	165,9%	n.a
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(10.726,7)	(26.259,1)	(58.468,4)	40,8%	18%
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(7.244,3)	(26.259,1)	(58.468,4)	27,6%	12,4%

Sampai dengan 31 Desember 2018, Layanan Perkeretaapian LRT Jakarta belum bisa beroperasi secara komersial, yang mana hal ini berimplikasi atas belum diperolehnya pendapatan usaha oleh Perseroan (sebagai penyelenggara sarana). Dalam RKAP, asumsi Perseroan operasi komersial di bulan Agustus 2018. Sedangkan dalam Prognosa, Perseroan belum ditargetkan beroperasi di tahun 2018.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Perseroan membukukan rugi sebesar minus Rp7,2 miliar. Realisasi tersebut adalah 27% dari rencana rugi prognosa yaitu sebesar Rp26.3 miliar.

TABEL Beban Umum dan Administrasi

(dalam jutaan Rupiah)	31 Desember 2018	Prognosa 2018	RKAP 2018	Perbandingan (%)	
	(Audited) (a)	(b)	(c)	a/b	a/c
Beban Pegawai	(10.785,3)	(18.502,8)	(18.400,0)	58,3%	58,6%
Beban Pemeliharaan	(314,2)	--	--	n.a	n.a
Beban Penyusutan	--	(212,6)	(7.500,0)	0%	0%
Beban Jasa Profesional	(219,0)	(2.475,0)	--	8,8%	n.a
Beban Umum	(2.606,3)	(3.252,3)	(8.300,0)	80,1%	31,4%
Total	(13.924,8)	(24.442,7)	(34.200,0)	57,0%	40,7%

Beban usaha Perseroan selama tahun 2018 sebesar Rp13,9 Miliar merupakan Beban Umum dan Administrasi dengan porsi terbesar adalah Beban Pegawai sebesar Rp10,8 Miliar ($\pm 77,7\%$), dan Beban Umum Kantor sebesar Rp2,6 Miliar ($\pm 18,7\%$).

Dengan belum beroperasinya Layanan Perkeretaapian LRT Jakarta secara komersial, Perseroan berusaha melakukan efisiensi antara lain dengan mengatur ulang rencana perekrutan SDM dengan mengutamakan SDM operasional, untuk tetap memenuhi ketentuan berlaku di industri perkeretaapian. Realisasi beban pegawai (termasuk pendidikan dan latihan, tunjangan pajak, dan asuransi pegawai) sebesar $\pm 58\%$ rencana awal.

Realisasi Beban Umum masih sejalan dengan rencana awal (versi Prognosa 2018). Sepanjang tahun 2018, Perusahaan masih menempati ruang kerja di Thamrin City (Gedung MCC, Depo LRT Jakarta masih dalam tahap penyelesaian untuk bisa digunakan sebagai kantor operasional Perusahaan).

3. Arus Kas

TABEL Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)	31 Desember 2018	Prognosa 2018	RKAP 2018	Perbandingan	
	(Audited)			(%)	
	(a)	(b)	(c)	a/b	a/c
Arus Kas Bersih - Aktivitas Operasi	(10.229,4)	(26.488,8)	(51.000,0)	38,6%	20,1%
Arus Kas Bersih - Aktivitas Investasi	(2.500,9)	(1.643,6)	--	152,2%	n.a
Arus Kas Bersih - Aktivitas Pendanaan	150.000,0	150.000,0	150.000,0	100,0%	100,0%
Kas dan Setara Kas Akhir	137.269,7	121.867,6	99.000,0	112,6%	138,7%

Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp10,2 Miliar, beban tersebut sebagai besar untuk membiayai beban gaji termasuk pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh SDM operasional guna mendapatkan sertifikasi keahlian dari Kementerian Perhubungan sebagai salah satu syarat kelengkapan perizinan.

Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp2,5 Miliar. Investasi tersebut antara lain implementasi Sistem *ERP Microsoft Dynamics 365*, pembelian peralatan kantor dan perangkat elektronik.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp150 Miliar, berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp148,5 miliar dan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebesar Rp1,5 miliar.



PROYEKSI TAHUN 2019

Manajemen telah menyusun proyeksi pencapaian tahun 2019 yang didasarkan oleh berbagai asumsi, antara lain :

1. Perkembangan perijinan terutama Izin Operasi Prasarana dan Sarana,
2. Perkembangan pelaksanaan konstruksi Prasarana, terutama untuk kesiapan Fasilitas Operasi,
3. Uji Coba (Commisioning) LRT Jakarta Koridor I (Fase I) di bulan Juni 2019.
4. Penyelesaian pembangunan Gedung MCC di akhir Kuartal I 2019.
5. Perkembangan persiapan operasi komersial :
 - Sertifikasi Sarana LRV, Jalur & Bangunan dan Fasilitas Operasi,
 - Proses perekrutan Sumber Daya Manusia yang efektif sesuai dengan rencana kebutuhan operasi komersial,
 - Persiapan *marketing campaign* yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran publik.

6. Perkembangan infrastruktur pendukung yang berhubungan dengan Keuangan, SDM, serta Informasi & Teknologi, serta
7. Perkembangan rencana bisnis untuk meningkatkan *ridership* dan pendapatan *nonfarebox*

Maka diperkirakan Layanan Perkeretaapian LRT Jakarta siap untuk dioperasikan pada awal Semester 2 tahun 2019, dengan 5 (lima) stasiun LRT Jakarta yang siap untuk menerima penumpang.

D

PROSPEK PERUSAHAAN

Layanan Perkeretaapian LRT Jakarta untuk Koridor I (terdiri atas 3 Fase) dengan panjang rute \pm 40 km yang melingkari Kota Jakarta, ditargetkan selesai dan siap dioperasikan secara komersial di pertengahan tahun 2022. Disamping itu, terdapat rencana pembangunan untuk Koridor II hingga koridor IV dengan target penyelesaian secara keseluruhan di tahun 2030.

Konsep integrasi antar moda transportasi publik dimana, MRT Jakarta sebagai backbone compass line, LRT Jakarta sebagai pengumpan (*feeder*) yang melingkari rute MRT Jakarta, serta integrasi dengan BRT Transjakarta untuk memastikan integrasi pelayanan transportasi publik kepada warga DKI Jakarta (khususnya) benar-benar terlaksana sampai dengan integrasi sistem pembayaran.

Maka dengan penguasaan terhadap fasilitas operasi LRT Jakarta, perusahaan memiliki potensi besar untuk menjadi *single operator* dalam penyelenggaraan layanan perkeretaapian LRT Jakarta.

E

ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR

Secara umum, periklanan memiliki potensi yang besar untuk PT LRT Jakarta, dengan memanfaatkan area ritel yang tersedia di setiap stasiun LRT Jakarta. Serta mendorong penyewaan oleh *anchor tenant* di bidang F&B, baik berupa restoran maupun cafe & bar. Integrasi melalui *skybridge* yang menjadi penghubung antara LRT Jakarta dengan BRT Transjakarta dinilai mampu meningkatkan jumlah penumpang dari kelapa Gading dan sekitarnya untuk melakukan perjalanan. Sistem pembayaran yang terintegrasi dengan moda transportasi publik lain menjadikan biaya perjalanan yang dilakukan lebih terjangkau. Target 14.225 penumpang/hari untuk tahun 2019, potensi penumpang utama adalah pekerja yang bekerja disekitar jaringan LRT Jakarta, maupun yang terlayani oleh Transjakarta (antara lain Koridor 2A dan koridor 4).

F

REALISASI PENGGUNAAN DANA SETORAN MODAL

Sampai dengan 31 Desember 2018, rencana pelaksanaan inbreng aset Sarana LRV dan AFC belum bisa direalisasikan. Adapun penggunaan modal awal sebesar Rp150.000.000.000,- selama masa pra operasi di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL Laporan Realisasi Penggunaan Modal

URAIAN	Rp. Juta								Tahun 2018
	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug - 18	Sept - 18	Oct - 18	Nov - 18	Dec - 18	
AKTIVITAS PENDANAAN									
Setoran Modal PT Jakarta Propertindo	-	-	-	-	-	-	-	-	148.500,0
Setoran Modal PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,0
Total Aktivitas Pendanaan									150.000,0
AKTIVITAS OPERASI									
Beban administrasi bank	(0,0)	(0,0)	(0,1)	(0,0)	(33,3)	(0,4)	(11,1)	(10,6)	(55,5)
Biaya perjalanan dinas	-	-	(7,0)	(5,9)	(126,2)	(66,1)	(98,0)	(218,0)	(521,1)
Biaya umum divisi dukungan kerja	-	-	-	(38,7)	-	(12,4)	(66,5)	-	(117,7)
Biaya umum divisi sdm	-	-	-	-	-	-	-	(24,1)	(24,1)
Gaji	(69,3)	(204,2)	(459,1)	(1.413,8)	(1.160,2)	(1.374,0)	(1.229,6)	(1.091,1)	(7.001,2)
Biaya tunjangan	-	(16,0)	(17,1)	(49,3)	(66,2)	(85,8)	(102,9)	(768,3)	(1.105,7)
Beban perlengkapan kantor	-	-	(141,5)	(203,8)	(52,6)	(6,8)	(64,8)	(38,6)	(508,1)
Biaya pengamanan objek vital	-	-	(54,4)	-	-	(490,0)	-	(52,5)	(596,9)
Biaya medical checkup	-	-	(2,9)	(29,1)	(40,4)	(2,1)	(0,4)	(1,8)	(76,6)
Konsumsi & akomodasi	-	-	-	(2,8)	(13,0)	-	(6,0)	(91,0)	(112,8)
Biaya seragam dan perlengkapan dinas	-	-	-	(78,5)	(26,1)	(99,5)	-	-	(204,1)
Biaya izin dan legalitas	-	-	-	(23,7)	(50,0)	-	-	-	(73,7)
Bensin, parkir, dan transport operasional	-	-	-	(10,9)	(10,2)	-	(7,1)	-	(28,3)
Beban rumah tangga lainnya	-	-	-	(27,8)	(1,2)	(15,3)	(13,3)	(76,7)	(134,2)
Biaya uji operasi	-	-	-	(957,3)	-	(107,1)	(1,8)	100,7	(965,5)
Pembayaran pajak dan bpjs	-	-	-	(67,7)	(101,2)	(19,4)	(173,5)	(178,3)	(540,1)
Biaya konsultan	-	-	-	-	(71,3)	-	-	(139,1)	(210,4)
Biaya asuransi dibayar dimuka	-	-	-	-	(406,0)	(442,0)	-	-	(847,9)
Biaya training dan pelatihan	-	-	-	-	(229,7)	(843,8)	-	(49,0)	(1.122,4)
Kebutuhan pantry	-	-	-	-	(0,6)	-	(1,5)	-	(2,1)
Biaya pegawai lain lain	-	-	-	-	(15,3)	(29,2)	(9,9)	(80,8)	(135,2)
Biaya sewa kendaraan direksi	-	-	-	-	(32,4)	(133,2)	(70,5)	(200,9)	(436,9)
Total Penggunaan Aktivitas Operasi	(69,3)	(220,2)	(682,0)	(2.909,3)	(2.435,8)	(3.727,3)	(1.856,7)	(2.920,0)	(14.820,6)
AKTIVITAS INVESTASI									
Pendapatan Bunga	8,5	0,0	680,9	216,7	163,5	517,0	597,9	579,5	2.764,0
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembelian Aset Tetap	-	-	(137,2)	(59,2)	(180,7)	(14,9)	(90,2)	(191,5)	(673,7)
Total Penerimaan dan Penggunaan Aktivitas Investasi	8,5	0,0	543,7	157,5	(17,1)	502,1	507,7	388,1	2.090,3
Saldo Kas dan Bank									137.269,7

G**INFORMASI RENCANA PENAMBAHAN MODAL MELALUI
INBRENG**

Sebagai penyelenggara sarana dalam layanan perkeretaapian LRT Jakarta, maka perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin operasi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah kepemilikan paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api sesuai dengan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian (referensi : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian).

Disamping itu, untuk kepentingan operasi dan perawatan atas *Automatic Fare Collection (AFC)* yakni sistem *ticketing* yang akan digunakan dalam penyelenggaraan layanan perkeretaapian LRT Jakarta, serta sebagai salah satu bagian dari komponen subsidi PSO (Subsidi Sarana) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api, perusahaan perlu untuk memiliki sistem *ticketing* AFC dimaksud.

Untuk keperluan diatas, PT Jakpro sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan sekaligus sebagai pemilik 8 (delapan) Trainset Sarana LRV, akan melakukan penambahan modal kepada perusahaan melalui Inbreng Aset berupa:

- 3 (tiga) Trainset Sarana LRV, dan
- AFC LRT Jakarta.

H

KELANGSUNGAN USAHA

Sistem transportasi Jakarta saat ini dibangun diatas empat komponen Utama:

- Jaringan jalan
- Jaringan Kereta api
- Jaringan bus
- Jaringan taksi

Manfaat yang utama dari LRT Jakarta adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, khususnya Koridor 1 Fase 1: Kelapa Gading – Velodrome. Layanan sistem kereta api yang efisien merupakan faktor penarik untuk mendukung peralihan moda transportasi yang mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Manfaat lainnya yaitu:

- Peningkatan mobilitas dan konektivitas masyarakat;
- Tersedianya moda transportasi yang aman dan dapat dipercaya;
- Peningkatan produktivitas karena penghematan waktu perjalanan;
- Peningkatan nilai lahan dan properti di daerah sekitar LRT Jakarta.

Terdapat potensi adanya perpanjangan jalur dari jalur semula, diantaranya:

- Perpanjangan LRT dari barat Velodrome sepanjang Jl. Pemuda/ Jl. Pramuka/ Jl. Matraman menuju Stasiun Manggarai.
- Perpanjangan LRT dari Stasiun Depo Pegangsaan Dua menuju Jakarta International Stadium, yang merupakan stadion olahraga kelas dunia.

I

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA NON FAREBOX

Keberhasilan PT LRT Jakarta dalam menyediakan secara konsisten pelayanan yang terintegrasi dan berkelas kepada penumpangnya, diperlukan fokus strategi bisnis yang tidak hanya mengalokasikan sumber dayanya dalam pendapatan *farebox*, melainkan juga pada pendapatan *Non Farebox* (NFB).

Pendapatan NFB berpotensi untuk diperoleh melalui pengoptimalan aset operasional LRT Jakarta untuk memperoleh pendapatan dari berbagai bisnis seperti periklanan, dan manajemen Ritel.

1. Bisnis Periklanan, akan dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, dan
2. Manajemen Ritel, akan dilakukan secara mandiri oleh Perusahaan.

05

TATA KELOLA PERSEROAN





A. PRINSIP DASAR TATA KELOLA PERUSAHAAN	71
B. INFORMASI PEMEGANG SAHAM	71
C. DEWAN KOMISARIS	71
D. DIREKSI	74
E. RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMSARIS DAN DIREKSI	77
F. AUDIT EKSTERNAL	78
G. AKSES INFORMASI DATA PERUSAHAAN	78
H. KODE ETIK	79
I. PERPAJAKAN	82

“

*Mengembangkan
jaringan transportasi
publik yang modern
dan terintegrasi*

”

A

PRINSIP DASAR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan menempatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) bukan hanya lebih dari sekedar kewajiban, tetapi telah menjadi bagian dari setiap inisiatif dan program kerja serta pelayanan yang diberikan kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Komitmen tersebut direalisasikan melalui penerapan dan tingkat kepatuhan GCG yang sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan dan best practise yang berlaku umum di Indonesia.

B

INFORMASI PEMEGANG SAHAM

Per 16 April 2018, Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Jakarta Propertindo dengan kepemilikan saham 99%.

C

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pengurusan perusahaan oleh direksi serta memberikan nasihat kepada direksi untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan. Tanggung jawab dan wewenang dewan komisaris Perusahaan dituangkan dengan jelas didalam Anggaran dasar Perusahaan dan telah merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan komisaris, antara lain:

Terdapat 2 (dua) Tingkatan Fungsi Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris, yaitu:

1. *Level Performance*, yaitu Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi, serta memberikan masukan kepada RUPS.
2. *Level Conformance*, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan, serta dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku.

Wewenang Dewan Komisaris:

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris memiliki wenang-wenang yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang;
2. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumendokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
3. Memasuki bangunan-bangunan dan pekarangan, gedung, Kantor atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan;
4. Bila dipandang perlu, dapat menghadiri rapatrapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya;
5. Pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
6. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
7. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris;
9. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
10. Membentuk Komite Audit Komite Pengembangan Usaha dan Komite Manajemen Risiko, serta komite lain jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
12. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;

13. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
14. Melakukan tindakan pengawasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar, termasuk dalam kaitannya dengan pengawasan sistem teknologi informasi Perseroan; pengelolaan sumber daya manusia; akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; pengadaan barang dan jasa; perkara dan sengketa material yang menyangkut Perseroan; standar mutu dan pelayanan; serta kepatuhan Perseroan terhadap ketentuanketentuan perjanjian yang material dan komitmen yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga yang bersifat material.
15. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS

D

DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas utama untuk menjalankan tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Direksi wajib memastikan agar perusahaan memperhatikan kepentingan pihak pemegang saham, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau keputusan RUPS.
2. Direksi bertanggung jawab atas tugas dan fungsi untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan perusahaan. Dalam hal pembagian tugas dan fungsi Direksi tidak ditentukan oleh RUPS, maka pembagian tugas dan fungsi direksi diatur dalam rapat direksi. Setiap anggota direksi oleh karenanya bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut masing-masing.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Ketentuan dalam UUPT tersebut mengandung konsep *fiduciary duty*. *Fiduciary duty* adalah suatu doktrin yang menunjukkan jalinan hubungan yang terjadi antara direksi dengan perusahaan, yaitu suatu kewajiban atas dasar itikad yang sebaik-baiknya, kepercayaan, keyakinan dan kejujuran yang dimiliki oleh penerima kepercayaan untuk kepentingan pemberi kepercayaan, dan dapat dikatakan pula yaitu suatu kewajiban untuk bertindak dengan tingkat kejujuran dan loyalitas yang setinggi-tingginya terhadap perusahaan untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Tanggung Jawab Pribadi

Tanggung Jawab Pribadi

Seorang Direktur dapat bertanggung jawab secara pribadi apabila:

1. Direktur tersebut telah lalai dan menyebabkan Perusahaan rugi sebagai akibat dari kelalaiannya tersebut;
2. Direktur melakukan tindakan yang mengandung benturan kepentingan dan merugikan Perseroan; dan
3. Anggota Direksi bertindak di luar kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Tanggung Jawab Serta dengan Direksi Lain

Setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab apabila terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut, antara lain:

1. Kepailitan dimana kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan dalam kepailitan tersebut;
2. Pembelian kembali saham yang melampaui batas ketentuan UUPT, yaitu pembelian kembali yang menyebabkan kekayaan bersih perusahaan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambahkan cadangan wajib;
3. Setiap pernyataan yang keliru atau informasi yang menyesatkan dalam laporan tahunan perusahaan;
4. Setiap pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat menyesatkan mengenai keadaan perusahaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat;

5. Pelaksanaan pendayagunaan aktiva tetap untuk kepentingan perusahaan, serta menjamin pendayagunaan tersebut agar bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain, antara lain dengan cara mengevaluasi perjanjian pendayagunaan aktiva tetap yang dianggap merugikan atau belum memberikan keuntungan yang optimal bagi perusahaan tersebut tidak dilakukan.
6. Tindakan yang dilakukan oleh anggota direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

E**RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMSARIS DAN DIREKSI**

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat salah satunya melalui pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Pada tahun 2018, melaksanakan 4 (empat) kali penyelenggaraan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal rapat	Agenda Rapat
1	31-Aug-2018	7 (tujuh) Aspek Prioritas
2	10-Sep-2018	Tenaga kerja PT LRT Jakarta
3	15-Nov-2018	Laporan dan Evaluasi Kinerja PT LRT Jakarta Persiapan operasional LRT Jakarta
4	30-Nov-2018	<i>Skybridge</i> sebagai alat integrasi untuk menambah Jumlah penumpang

F**AUDIT EKSTERNAL**

Akuntan Publik bertugas untuk memastikan kualitas pelaporan dalam informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Untuk periode tahun 2018, Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018. Biaya Audit untuk tahun buku 2018 dialokasikan dari anggaran konsolidasi dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai induk perusahaan.

G**AKSES INFORMASI DATA PERUSAHAAN**

Sebagai komitmen keterbukaan bagi seluruh *stakeholders*, Perseroan telah menyediakan sejumlah media dan saluran. Diantaranya adalah website, penerbitan media internal secara berkala, penyediaan aplikasi LRTJ Apps bagi penumpang serta akun media sosial.

E-mail : info@lrtjakarta.co.id

Situs : www.lrtjakarta.co.id

Instagram : [lrtjkt](https://www.instagram.com/lrtjkt)

Twitter : [@lrtjkt](https://twitter.com/lrtjkt)

Facebook : [LRT Jakarta](https://www.facebook.com/LRT.Jakarta)

LinkedIn : [PT LRT Jakarta](https://www.linkedin.com/company/pt-lrt-jakarta)

Alamat : Gedung Thamrin City Lt.1, Lobby Timur Jl. Thamrin
Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, 10230,
Indonesia

Telepon : +62 21-2962-5700

Sebagai bagian dari penerapan pembangunan budaya dan karakter Perseroan PT LRT Jakarta berkomitmen untuk mencapai visi dan misi Perseroan dengan menerapkan salah satunya adalah praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) melalui penerapan Kode Etik Perseroan.

Etika dan perilaku dari nilai-nilai moral berdasarkan budaya Perseroan dan semangat GCG diharapkan dapat membawa Perseroan ini menjadi Perseroan yang memiliki integritas tinggi, peduli dalam memberikan pelayanan yang semakin baik, komitmen kepada semua pihak yang terkait, dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kapabel sehingga menjadikan Perseroan ini menjadi kebanggaan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Kode ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi :

1. Insan Perusahaan: Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, dan Jajaran Manajemen.
2. Pegawai.
3. Penumpang/Konsumen/Customer, Rekanan, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam Perseroan ini.

Kode etik harus dimengerti, dipahami, disadari, dan dipatuhi sebagai wujud tanggung jawab terhadap Kode Etik Perseroan, Peraturan, dan Perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin dan menjaga usaha ini berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. LRT Jakarta percaya dengan meletakkan etika dan perilaku yang baik, secepatnya mampu membawa Perseroan ini menjadi Perseroan yang membanggakan dan terbaik di Negara ini bahkan dihormati oleh negara lain.

Kode Etik PT LRT Jakarta sendiri masih dalam tahap pembuatan.

Isi Kode Etik

Etika Perusahaan dengan Pegawai

Perseroan memperlakukan pegawai secara setara dan tidak membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin dalam segala aspek. Pegawai Perseroan tidak membedakan dan tidak boleh di kenakan tindakan diskriminasi karena alasan kesukuan, latar belakang etnis, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, seniorlitas, pendapat politik, keanggotaan serikat, dan status sosial. Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja anak-anak atau di bawah umur.

Perseroan menjamin semua aspek kondisi kerja dan lingkungan (kesehatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan) serta hak pegawai sesuai peraturan Perseroan dan Perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mendukung peningkatan komperhensif pegawai seluas-luasnya sehingga mampu mendukung Perseroan untuk kompetitif dalam menghadapi perkembangan global. Pegawai Perseroan di tuntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif untuk meningkatkan produktifitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, serasi, dan seimbang antara Perseroan dan pegawai.

Perseroan mengakui nilai dari pegawai yang beragam dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja Perseroan dengan menetapkan reward kepada pegawai yang berpotensi dan punishment kepada pegawai yang melanggar prosedur.

Etika Perusahaan dengan Konsumen

Perseroan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen berdasarkan 3 pilar utama misi perusahaan:

1. Menyediakan layanan transportasi publik warga Jakarta yang aman dan nyaman,
2. Mengembangkan jaringan transportasi publik yang modern dan integrasi,
3. Membangun reputasi perusahaan dengan pengembangan sumber daya manusia yang LRTJ.

Perseroan melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mendukung prinsip ISO 9001 yang berfokus pada kepuasan pelanggan dan perbaikan terus menerus. Insan Perseroan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen sesuai dengan Peraturan Perseroan, Etika Perseroan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Etika Perusahaan dengan Masyarakat

Perseroan menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan mengedepankan prinsip moral dan etika untuk mencapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainya. Perseroan menyediakan dana dalam mendukung tanggung jawab sosial, yang dituangkan dalam kebijakan, untuk memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat berdasarkan anggaran, Peraturan Perseroan, etika, dan Perundang-undangan yang berlaku.

Etika Perusahaan dengan Lingkungan

Perseroan berupaya keras untuk meminimalkan dampak lingkungan dan menjadi Perseroan yang ramah lingkungan. Perseroan meningkatkan kesadaran lingkungan kepada semua pegawai. Perseroan menerapkan standar kerja dengan memperhatikan hasil Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan akan berusaha mengembangkan teknologi terbaik untuk penanganan energi dan sumber daya yang berdampak pada masalah lingkungan. Insan Perseroan dilarang merokok disembarang tempat sesuai dengan aturan yang berlaku. Insan Perseroan harus membuang sampah pada tempatnya dan dilarang membuang sampah sembarangan.

Etika Perusahaan dengan Pemerintah

Perseroan mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan dengan berbagai fungsi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah berlandaskan pada standar etika dan komunikasi efektif dengan memperhatikan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Etika Perusahaan dengan Media Massa

Perseroan memberikan informasi-informasi yang akurat, dapat dipahami, relevan, dan berimbang yang diperlukan oleh masyarakat kepada media massa dan berbagai komunitas publik lainnya. Perseroan mengembangkan dan memonitor informasi-informasi yang disampaikan oleh media massa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan perbaikan terus menerus Perseroan dengan tetap memperhatikan aspek biaya, risiko, Etika Perusahaan, peraturan, dan Perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan melarang segala yang tidak pantas, melanggar peraturan dan Perundang-undangan yang terkait dengan Informasi dan Teknologi atas sistem, telepon, email, situs web, koneksi internet, dan perangkat elektronik lainnya. Perseroan menjalin kerjasama yang setara, seimbang, dan saling mendukung dengan prinsip-prinsip keterbukaan yang bertanggung jawab. Perseroan dalam memberikan informasi kepada media massa dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menghindari adanya informasi yang tidak sesuai dan saling bertentangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan harus memenuhi kewajiban perpajakan sebagai salah satu kontribusi kepada Negara/Kontribusi Pemerintah Pusat.

Adapun, kontribusi pembayaran pajak selama tahun 2018 yakni sebagai berikut:

- PPh Pasal 21-26, Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan sebesar Rp276.011.400,-
- PPh Pasal 23-26, Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan sebesar Rp38.837.351,86,-
- PPh Final Pasal 4(2), Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan sebesar Rp8.350.644,25,-
- Total kontribusi kewajiban perpajakan Perusahaan selama tahun 2018 sebesar Rp323.199.396,11,-

06

TANGGUNG
JAWAB
SOSIAL
PERSEROAN





06 TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERSEROAN

Table of Content

1. KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP	87
2. TANGGUNG JAWAB SOSIAL ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	87

1

KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan angkutan berbasis rel yang berwawasan lingkungan sebagai bagian dari misi perusahaan. Realisasi terhadap misi tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyediaan sarana kereta berpengerak listrik. Dengan mengoperasikan sarana kereta berpengerak listrik, Perseroan telah berpartisipasi dalam penggunaan energi baru - terbarukan (*renewable energy*) serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

2

TANGGUNG JAWAB SOSIAL ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Sebagai penyedia layanan jasa transportasi publik, Perseroan menempatkan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai faktor penting dalam kegiatan operasional. Dalam perspektif tersebut, K3 merupakan landasan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman di mana seluruh pegawai dapat bekerja secara optimal dan menghadirkan layanan jasa transportasi publik yang andal di wilayah pelayanan PT LRT Jakarta.

Pelaksanaan program K3 selama tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan tingkat keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja melalui program dan kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai secara langsung, antara lain:

- a. Pemeriksaan kesehatan berkala tahunan (MCU) bagi pegawai yang baru direkrut.
- b. Pelaksanaan *Health Risk Assessment (HRA)* yang bersifat *Pre-Operation* (Sebelum operasional pelayanan dimulai) untuk memastikan pemetaan risiko bahaya akibat kerja dan bahaya ditempat kerja lainnya.
- c. Penyelenggaraan *Tabletop LRT Emergencies Exercise* sebagai prosedur standar penanganan keadaan darurat di area Prasarana dan Sarana LRT Jakarta.



LRT JAKARTA
moving people, connecting communities

LAPORAN KEUANGAN

PT LRT JAKARTA

**Laporan Keuangan
Untuk Periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2018**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan
Untuk Periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2018

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

**PT LRT JAKARTA
SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Nama | : | Allan Tandiono |
| Alamat Kantor | : | Gedung Thamrin City Lantai 1 Lobby Timur
JL Thamrin Boulevard RT/RW 003/008
Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang
Kota Administrasi Jakarta Pusat |
| Alamat Rumah | : | Pantai Mutiara Blok A No.8 RT/RW 001/016
Kel. Pluit Kec. Penjaringan
Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Nomor Telfon | : | +62811-912-606 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| | | |
| 2. Nama | : | Solihin |
| Alamat Kantor | : | Gedung Thamrin City Lantai 1 Lobby Timur
JL Thamrin Boulevard RT/RW 003/008
Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang
Kota Administrasi Jakarta Pusat |
| Alamat Rumah | : | Mutiara Sentul Blok Q No. 9 RT/RW 002/010
Kel. Nanggewer Kec. Cibinong
Kabupaten Bogor Jawa Barat |
| Nomor Telfon | : | +62811-859-141 |
| Jabatan | : | Direktur |

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT LRT Jakarta;
2. Laporan keuangan PT LRT Jakarta telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT LRT Jakarta telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT LRT Jakarta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT LRT Jakarta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Mei 2019
Direksi


Allan Tandiono
Direktur Utama

Solihin
Direktur

**RSM**

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor : 00649/2.1030/AU.1/06/0181-1/1/V/2019

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT LRT Jakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT LRT Jakarta ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode 16 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

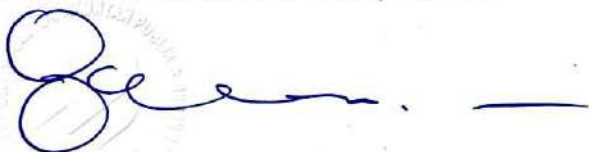
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT LRT Jakarta tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas nya untuk periode 16 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Benny Andria

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181

Jakarta, 15 Mei 2019

PT LRT JAKARTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	3	137.269.727.476
Piutang Lain-lain		
Piutang Berelasi	4.a	2.429.500.736
Piutang Pihak Ketiga	4.b	454.666.667
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	5	458.968.750
Pajak Pertambahan Nilai		134.797.710
Jumlah Aset Lancar		<u>140.747.661.339</u>
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap	6	694.365.727
Aset Lain-lain	7	1.752.545.455
Aset Pajak Tangguhan	10.d	3.482.344.128
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>5.929.255.310</u>
JUMLAH ASET		<u>146.676.916.649</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Usaha	8	406.694.916
Beban Akrua	9	2.992.516.763
Utang Pajak	10.a	210.583.665
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>3.609.795.344</u>
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	11	311.462.797
Jumlah Liabilitas		<u>3.921.258.141</u>
Ekuitas		
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
Modal Dasar - 600.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 150.000 Saham	12	150.000.000.000
Defisit		(7.244.341.492)
Jumlah Ekuitas		<u>142.755.658.508</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>146.676.916.649</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT LRT JAKARTA**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>
Pendapatan		--
Beban Pokok Pendapatan		--
Laba Bruto		--
Beban Umum dan Administrasi	13	(13.924.831.087)
Beban Pemasaran	13	(22.603.100)
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi	10	--
Penghasilan Lain-lain - Bersih	14	3.220.748.567
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan		(10.726.685.619)
Manfaat Pajak Penghasilan		3.482.344.128
Rugi Periode Berjalan		(7.244.341.492)
Penghasilan Komprehensif Lain		--
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan		(7.244.341.492)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT LRT JAKARTA**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

		Modal Ditempatkan dan Setor Penuh Rp	Saldo Rugi Rp	Jumlah Ekuitas Rp
Saldo Pada Tanggal Pendirian (16 April 2018)				
Setoran Modal	12	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Rugi Komprehensif Periode Berjalan		--	(7.244.341.492)	(7.244.341.492)
Saldo per 31 Desember 2018		150.000.000.000	(7.244.341.492)	142.755.658.508

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT LRT JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran kepada Pemasok dan Pihak Ketiga		(9.373.902.382)
Pembayaran Uji Coba Operasi Kereta		(2.359.500.736)
Penerimaan Bunga Deposito dan Giro		1.504.000.000
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi		<u>(10.229.403.118)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan Aset Tetap		<u>(2.500.869.406)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Dari Setoran Modal Pemegang Saham		<u>150.000.000.000</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		137.269.727.476
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		<u>--</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3	<u><u>137.269.727.476</u></u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT LRT JAKARTA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT LRT Jakarta ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0020380.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 17 April 2018.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Thamrin City Lantai 2 Lobby Timur, Jalan M.H. Thamrin Boulevard, Jakarta.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Jakarta Propertindo.

1.b. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 10 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tanggal 10 April 2018, susunan pengurus Perusahaan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Satya Heragandhi

Dewan Direksi

Direktur Utama : Allan Tandiono

Direktur : Solihin

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 19 Karyawan (tidak diaudit).

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Perusahaan menetapkan mata uang fungsional dan unsur-unsur dalam laporan keuangan diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.b. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, yaitu:

- PSAK 16 (Amandemen 2015): "Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif"
- PSAK 69: "Agrikultur"

PT LRT JAKARTA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

- PSAK 2 (Amandemen 2016): "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"
- PSAK 46 (Amandemen 2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- PSAK 13 (Amandemen 2017): "Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi"
- PSAK 53 (Amandemen 2017): "Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017): "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2.c. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kuasa pemegang saham.

2.d. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan Perusahaan, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs,

PT LRT JAKARTA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- (ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Perusahaan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perusahaan mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;

PT LRT JAKARTA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Perusahaan tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1)
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.f. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomi saset sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Tahun
Inventaris Kantor	4

PT LRT JAKARTA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Konstruksi" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Perusahaan menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

2.g. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

2.h. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Aset nonkeuangan diuji atas penurunan nilai ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Kerugian atas penurunan nilai diakui di laporan laba rugi sebesar selisih lebih nilai tercatat aset atas jumlah terpulihkan, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah di mana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset nonkeuangan yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

2.i. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

PT LRT JAKARTA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - (i) entitas kena pajak yang sama; atau
 - (ii) entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Perusahaan melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perusahaan:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

PT LRT JAKARTA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

2.j. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- (a) Ketika Perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- (b) Ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Perusahaan mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

2.k. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan Perusahaan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini.

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan melakukan penilaian terhadap penurunan nilai dengan cara individual, dilakukan untuk jumlah aset keuangan yang melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu dan aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai yang telah teridentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari

PT LRT JAKARTA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

estimasi terbaik atas arus kas masa depan dan realisasi agunan pada tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Estimasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas utang dan fleksibilitas keuangan debitur, kualitas pendapatan debitur, jumlah dan sumber arus kas, industri di mana debitur beroperasi dan nilai realisasi agunan. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan. Jumlah penerimaan tergantung pada kinerja debitur pada masa mendatang dan nilai agunan, keduanya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa depan, di samping itu agunan mungkin tidak mudah dijual.

Nilai aktual arus kas masa depan dan tanggal penerimaan mungkin berbeda dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam laporan keuangan.

Estimasi Umur Manfaat

Perusahaan melakukan penelaahan atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi atas perubahan estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor tersebut.

Imbalan Kerja

Nilai kini atas kewajiban imbalan kerja karyawan tergantung dari sejumlah faktor aktuarial yang dipertimbangkan berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi nilai tercatat atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang mendekati jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Nilai tercatat atas imbalan pasca kerja karyawan telah diungkapkan dalam Catatan 11.

3. Kas dan Setara Kas

	<u>2018</u>
Kas	<u>153.761.201</u>
Bank	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	<u>27.115.966.275</u>
Jumlah Bank	<u>27.115.966.275</u>
Deposito Berjangka	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	20.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	20.000.000.000
PT Bank DKI	15.000.000.000
PT Bank Mega	<u>10.000.000.000</u>
Jumlah Deposito	<u>110.000.000.000</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>137.269.727.476</u>
Tingkat Bunga Deposito per Tahun	7% - 7,5%
Jangka Waktu	1 Bulan

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)
 Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. Piutang Lain-lain

	2018
a. Pihak Berelasi	
Piutang Uji Coba Operasi	
PT Jakarta Propertindo	2.359.500.736
Piutang Bunga Deposito	
PT Bank DKI	70.000.000
Jumlah	<u>2.429.500.736</u>
a. Piutang Pihak Ketiga	
Piutang Bunga Deposito	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	116.666.667
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	96.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	96.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	96.000.000
PT Bank Mega	50.000.000
Jumlah	<u>454.666.667</u>
Jumlah Piutang Lain-lain	<u>2.884.167.403</u>

Piutang lain-lain kepada PT Jakarta Propertindo merupakan piutang terkait dengan biaya-biaya atas kegiatan uji coba operasi Perusahaan untuk periode yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan 9 September 2018. Hal ini sesuai dengan Surat PT Jakarta Propertindo Nomor 024/UT2000/110/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa PT Jakarta Propertindo selaku pemilik saham 99% dari Perusahaan menugaskan kepada Perusahaan untuk melakukan Uji Operasi Perusahaan. Atas kegiatan ini maka biaya yang harus ditanggung PT Jakarta Propertindo pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.359.500.736 per 31 Desember 2018.

Piutang bunga deposito sebesar Rp524.666.667 merupakan akrual bunga deposito sampai dengan 31 Desember 2018 atas bilyet deposito PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank DKI, dan PT Bank Mega dengan tingkat suku bunga sebesar 7 – 7,5% per tahun

5. Biaya Dibayar di Muka

Merupakan saldo premi asuransi karyawan Perusahaan kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp458.968.750.

6. Aset Tetap

	2018			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Perlengkapan Kantor	--	748.323.951	--	748.323.951
Jumlah	--	<u>748.323.951</u>	--	<u>748.323.951</u>
Akumulasi Penyusutan				
Perlengkapan Kantor	--	(53.958.224)	--	(53.958.224)
Jumlah	--	<u>(53.958.224)</u>	--	<u>(53.958.224)</u>
Nilai Tercatat	<u>--</u>			<u>694.365.727</u>

Beban penyusutan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp53.958.224 dialokasikan ke beban umum dan administrasi (catatan 12).

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2018.

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)
 Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan pembelian sistem ERP 365 kepada PT Kreatif Dinamika Integrasi, dan sampai dengan 31 Desember 2018 progress sistem ERP sudah mencapai 80% dengan nilai Rp1.752.545.455.

8. Utang Usaha

	<u>2018</u>
PT Kreatif Dinamika Integrasi	350.509.091
Lain-lain	56.185.825
Jumlah	<u><u>406.694.916</u></u>

9. Beban Akruai

	<u>2018</u>
Beban Kantor	1.684.739.991
Beban Karyawan	1.189.351.922
Beban Asuransi Pegawai	90.656.500
Lainnya	27.768.350
Jumlah	<u><u>2.992.516.763</u></u>

10. Perpajakan

a. Utang Pajak

	<u>2018</u>
Utang Pajak	
Pasal 21	182.737.612
Pasal 23	23.526.053
Pasal 4(2)	4.320.000
Jumlah	<u><u>210.583.665</u></u>

b. Beban Pajak Penghasilan

	<u>2018</u>
Pajak Kini	--
Pajak Tangguhan	3.482.344.128
Jumlah Manfaat Pajak - Bersih	<u><u>3.482.344.128</u></u>

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>
Rugi Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	(10.726.685.619)
Perbedaan Temporer	
Liabilitas Imbalan Pascakerja	311.462.797
Jumlah	<u><u>311.462.797</u></u>
Perbedaan Tetap	
Beban Rapat Kerja	132.013.496
Beban Kerumah Tanggaan	219.134.404
Lain-lain	97.347.484
Penghasilan Bunga yang Telah Dikenakan Pajak Final	(3.962.649.073)
Jumlah	<u><u>(3.514.153.689)</u></u>
Rugi Fiskal Tahun Berjalan	<u><u>(13.929.376.511)</u></u>

PT LRT JAKARTA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

d. Pajak Tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan per 31 Desember 2018 dan 2017 berikut ikhtisar mutasi perubahannya selama tahun - tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	16 April 2018	Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komperhensif Lain	2018
Liabilitas Imbalan Pascakerja	--	77.865.699	--	77.865.699
Pengakuan Rugi Fiskal	--	3.404.478.429	--	3.404.478.429
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	--	3.482.344.128	--	3.482.344.128

11. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja minimum kepada karyawan yang berhak berdasarkan Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan.

Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan pasca kerja Perusahaan per 31 Desember 2018 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria PT Katsir Imam Sapto Sejahtera pada tanggal 12 Maret 2019. Penggunaan teknik aktuarial atas imbalan pasca kerja dilakukan dengan mendiskontokan imbalan dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini, berdasarkan *Projected Unit Credit Method (PUC Method)* dengan asumsi sebagai berikut:

	2018
Asumsi Perhitungan :	
Jumlah Pegawai	19 orang
Usia Pensiun	56 Tahun
Tingkat Kenaikan Gaji	8, % per Tahun
Tingkat Bunga	8,2 % per Tahun
Tingkat Kematian	TMI - III 2011

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan sebagai berikut:

	2018
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	311.462.797
Liabilitas Imbalan Kerja	311.462.797

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2018
Biaya Jasa Kini	311.462.797
Jumlah Beban Imbalan Kerja	311.462.797

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2018
Liabilitas pada Awal Tahun	--
Beban Imbalan Kerja (Catatan 12)	311.462.797
Pembayaran Imbalan Kerja	--
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	--
Liabilitas pada Akhir tahun	311.462.797

Program liabilitas imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko bunga dan risiko gaji.

PT LRT JAKARTA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program namun sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

	<u>2018</u> <u>Rp</u>
Analisis Sensitivitas	
Sensitivitas (-1%) terhadap tingkat bunga	
Nilai kini Kewajiban	348.360.311
Biaya Jasa Kini	348.360.311
Biaya Bunga	--
Sensitivitas (+1%) terhadap tingkat bunga	
Nilai kini Kewajiban	279.760.636
Biaya Jasa Kini	279.760.636
Biaya Bunga	--
	<u>2018</u> <u>Rp</u>
Analisis Sensitivitas	
Sensitivitas (-1%) terhadap tingkat Gaji	
Nilai kini Kewajiban	280.875.707
Biaya Jasa Kini	280.875.707
Biaya Bunga	--
Sensitivitas (+1%) terhadap tingkat Gaji	
Nilai kini Kewajiban	346.299.942
Biaya Jasa Kini	346.299.942
Biaya Bunga	--

12. Modal Saham

Berdasarkan Akta No. 10 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn tanggal 16 April 2018, yang berisi tentang pendirian Perseroan Terbatas yang bernama PT LRT Jakarta. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp600.000.000.000 terbagi atas 600.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Para Pemegang Saham sebesar 25% atau sejumlah 150.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000. Akta ini juga telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0020380.AH.01.01. tanggal 17 April 2018. Sehingga komposisi dan susunan pemegang saham per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>		
	<u>Jumlah Saham</u> <u>Ditempatkan dan</u> <u>Disetor Penuh</u>	<u>Persentase</u> <u>Pemilikan</u>	<u>Jumlah</u> <u>Rp</u>
PT Jakarta Propertindo	148.500	99%	148.500.000.000
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	1.500	1%	1.500.000.000
Jumlah	150.000	100%	150.000.000.000

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)
 Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

13. Beban Usaha

	2018
Beban Pemasaran	
Promosi dan Penjualan	22.603.100
Jumlah Beban Pemasaran	22.603.100
Beban Umum dan Administrasi	
Gaji dan Tunjangan	8.745.669.670
Pendidikan dan Pelatihan	1.044.481.852
Perjalanan Dinas Luar Kota	518.718.774
Premi Asuransi	481.416.850
Sewa Kendaraan	408.738.111
Asuransi Pegawai	407.695.017
Peralatan Kantor	403.396.093
Pemeliharaan	314.177.548
Imbalan Pascakerja (Catatan 10)	311.462.797
Beban Tunjangan Pajak	276.011.400
Jasa Profesional	219.012.000
Kegiatan Kerja	171.320.076
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	622.730.899
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	13.924.831.087
Jumlah Beban Usaha	13.947.434.187

Dalam operasional Perusahaan terdapat Beban umum dan administrasi sebesar Rp13.924.831.087 terdapat didalamnya Beban pegawai di bagian Sarana sebesar Rp2.998.837.453, Beban Pegawai di Bagian Prasarana dan Fasilitas Operasi sebesar Rp956.814.283, serta Beban Pegawai di Bagian Supporting (non operasi) sebesar Rp5.344.327.247.

14. Penghasilan Lain-lain-Bersih

	2018
Penghasilan Lain-lain	
Bunga Deposito Berjangka	2.550.927.582
Jasa Giro	1.408.921.490
Penghasilan Lain-lain	2.800.000
Sub Jumlah	3.962.649.072
Beban Lain-lain	
Beban Pajak Deposito	594.075.999
Administrasi Bank	146.429.965
Beban Lainnya	1.394.541
Sub Jumlah	741.900.505
Jumlah	3.220.748.567

15. Transaksi dengan Pihak Berelasi

- a. Sifat hubungan dan transaksi
 Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
PT Bank DKI	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Daerah	Penempatan Bank dan Deposito
PT Jakarta Propertindo	Entitas Induk	Piutang, Utang Dividen

PT LRT JAKARTA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk periode 16 April 2018 (Tanggal Pendirian)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

- b. Saldo akhir yang timbul dari transaksi pihak berelasi:

	2018 Rp	Persentase terhadap
		Total Aset 2018 %
Kas dan Setara Kas		
PT Bank DKI	10.000.000.000	6,82%
Piutang Lain-lain		
PT Jakarta Propertindo	2.359.500.736	1,61%
Jumlah	12.359.500.736	8,44%

16. Perjanjian dan Perikatan Penting

Penugasan PT LRT Jakarta sebagai pelaksana Uji Operasi LRT Jakarta – PT Jakarta Propertindo
Berdasarkan Surat Penugasan dari PT Jakarta Propertindo No. 024/UT2000/110/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 serta surat ini juga Menunjuk kepada:

1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) untuk penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk Trase Jalur Kelapa Gading – Velodrome.
2. Penyelenggaraan Asian Games 2018 yang akan dimulai pada tanggal 18 Agustus 2018 – 2 September 2018
3. Arahan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Rapimgub yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2018, dimana LRT Jakarta harus tetap beroperasi selama Asian Games

Berdasarkan hal hal tersebut, maka PT Jakarta Propertindo menugaskan pada PT LRT Jakarta sebagai pelaksana Uji Operasi LRT Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2018 s.d 9 September 2018.

17. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko nilai tukar, risiko kredit dan risiko pemeliharaan rasio modal. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi fleksibilitas kontraktualnya. Berikut ini eksposur piutang dalam laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit 31 Desember 2018 sebagai berikut:

	31 Desember 2018		
	Jumlah Rp	> 1 tahun Rp	≤ 1 tahun Rp
Piutang Lain-lain	2.359.500.736	--	2.359.500.736
Jumlah	2.359.500.736	--	2.359.500.736

Perusahaan tidak membentuk cadangan kecukupan penurunan nilai berdasarkan estimasi arus kas di masa depan baik secara individu maupun secara kelompok dengan profile risiko serupa per 31 Desember 2018.

18. Standar dan Interpretasi yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2019.

Amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan ini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): “Kombinasi Bisnis”
- PSAK 24 (Amandemen 2018): “Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program”
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): “Biaya Pinjaman”
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): “Pajak Penghasilan”
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): “Pengaturan Bersama”
- ISAK 33: “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”
- ISAK 34: “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”,

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 71: “Instrumen Keuangan”
- PSAK 72: “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”
- PSAK 73: “Sewa”
- PSAK 62 (Amandemen 2017): “Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi”
- PSAK 15 (Amandemen 2017): “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
- PSAK 71 (Amandemen 2018): “Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”

Hingga tanggal laporan keuangan Perusahaan interim ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

19. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan Perusahaan diotorisasi oleh Direksi untuk terbit pada tanggal 15 Mei 2019.



LAPORAN TAHUNAN 2018

Gedung Thamrin City, Lantai 1
Jl. Thamrin Boulevard Jakarta 10230
Indonesia
Telepon: +6221-2962-5700
Fax: +6221-2962-5708

